

BAB II

ISI

A. SEJARAH PEMERINTAHAN MESIR

1. Profil Negara Mesir

Kairo adalah ibukota negara Mesir. Mesir memiliki luas wilayah 997.739 km². Bentuk pemerintahan Mesir adalah republik. Jumlah penduduk sekitar 76.117.420 jiwa. Lagu kebangsaan negara Mesir adalah "Hani an be tu da to Samil Ma Kam". Bahasa utama negara Mesir adalah Bahasa Arab. Penduduk Mesir beragama Islam dan Kristen. Mata uang yang digunakan di Mesir adalah Pound Mesir (Elaine Jackson, 2007: 5).

Gambar 2

Peta Negara Mesir



Sumber : (www.google.com, diakses tanggal 13/2/2014 pukul 12:30 WIB).

Letak astronomis Mesir terletak di antara 25° BT- 36° BT dan antara 22° LU- 32° LU. Secara geografis Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Sebelah Utara Mesir berbatasan dengan Laut Tengah. Batas Mesir

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Gaza, Israel, dan Laut Tengah. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Sudan. Batas Mesir sebelah barat berbatasan dengan Libya. (www.google.com, diakses tanggal 13/2/2014, pukul 12:30 WIB).

Wilayah dataran Negara Mesir secara garis besarnya dapat dibagi menjadi lima kawasan yaitu sebagai berikut:

- Semenanjung Sinai adalah dataran tinggi yang terletak di sebelah timur Terusan Suez dan memanjang sampai perbatasan Arab, Yordania, dan Israel. Daerah ini terdapat Gunung Tertinggi Negara Mesir yaitu Gunung Katherina dengan ketinggian 2.637 m (Elaine Jackson, 2007: 5-6).
- Gurun Barat, Gurun ini terletak di sebelah timur Libya. Luasnya kurang lebih 674.000 km² atau hampir tiga perempat wilayah negara Mesir. Kawasan ini dijumpai adanya daerah depresi. Daerah depresi yaitu daerah yang letaknya lebih rendah dari permukaan air laut. Depresi tersebut dikenal dengan nama “*Depresi Qatara*”. Daerah depresi ini dijumpai adanya oase-oase yang antara lain Oase Faranfra, Oase Dakhla, dan Oase Kharijah (www.google.com, diakses tanggal 13/2/2014 pukul 14.23 WIB).
- Gurun Timur. Kawasan ini membentang ke timur dari Lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Di gurun timur ini banyak dijumpai adanya wadi. Wadi adalah lembah-lembah sungai yang kering. Gunung tertinggi di kawasan gurun timur adalah Gunung Shayib dengan ketinggian 2.187 m (www.google.com, diakses tanggal 13/2/2014 pukul 14.23 WIB).
- Lembah Sungai Nil. Kawasan ini merupakan pusat permukiman penduduk Negara Mesir. Kawasan ini terletak memanjang dari perbatasan Sudan sampai

ke Laut Tengah. Daerah ini juga terdapat bendungan terkenal yaitu Bendungan Aswan. Bendungan ini memiliki fungsi utama sebagai irigasi dan sebagai penanggulangan bahaya banjir dari sungai Nil (Elaine Jackson, 2007:16).

- Delta Sungai Nil. Delta ini merupakan suatu daerah yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian Negara Mesir. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Benua Afrika dan di dunia dengan panjang 6.690 km. Sungai Nil mempunyai manfaat besar bagi Negara Mesir, antara lain sebagai: Sarana lalu-lintas pelayaran, sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana air minum, dan sebagai sarana irigasi bagi lahan pertanian (Elaine Jackson, 2007: 16).

c. Iklim Negara Mesir

Berdasarkan letak lintangnya, sebagian besar wilayah Mesir berada pada daerah subtropis. Dengan demikian, tipe iklim yang ada di Mesir adalah iklim subtropis kering. Mesir sering terjadi juga angin badai. Angin badai tersebut kering dan berdebu. Angin itu bertiup dari Gurun Sahara menuju ke Delta Sungai Nil. Peristiwa angin badai terjadi antara April – Mei. Angin ini berpengaruh buruk terhadap tanaman di Delta Sungai Nil. Perbedaan antara musim panas dengan musim dingin sangat besar. Musim panas di Negara Mesir terjadi pada bulan Mei – Oktober dengan suhu rata-rata 31°C pada siang hari dan 15°C pada malam hari. Musim dingin terjadi pada bulan November – April dengan suhu berkisar antara 11°C – 18°C . Hujan biasanya terjadi pada musim ini, dengan curah hujannya hanya berkisar antara 100 – 200 mm dalam satu tahun. (Elaine Jackson, 2007:10-11).

d. Penduduk Negara Mesir

Penduduk Negara Mesir berjumlah kurang lebih 76.117.420 jiwa. Mesir memiliki kepadatan penduduk 66 jiwa / km². Mesir merupakan negara yang penyebaran penduduknya paling tidak merata di dunia karena hanya 4% wilayah negara Mesir yang didiami oleh penduduknya, sedangkan 96% wilayah lainnya merupakan padang pasir yang gersang. Penduduk Negara Mesir terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, dan suku Arab. Suku Hamis merupakan suku asli Mesir yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman, suku Nubia berkulit hitam, dan suku Arab berkulit kemerah-merahan (Elaine Jackson, 2007 : 5).

e. Perekonomian Mesir

- Peternakan dan pertanian

Sektor pertanian Negara Mesir berkembang pesat. Produksi pertanian Negara Mesir meningkat, dikarenakan adanya beberapa bendungan, yaitu bendungan Aswan, Khartum, Asviut, dan Kairo, tujuannya yaitu untuk irigasi lahan pertanian dan juga untuk mencegah bahaya banjir. Produk pertanian Mesir adalah kapas, tebu, padi, jagung, gandum, gula, kurma dan minyak zaitun. Penanaman kapas diusahakan di daerah sekitar lembah Sungai Nil. Padi ditanam di Lembah Sungai Nil bagian utara, sedangkan tebu ditanam di lembah Sungai Nil bagian selatan. Padi juga termasuk komoditas ekspor (Elaine Jackson, 2007 : 18).

Sektor peternakan banyak diusahakan oleh penduduk nomaden yang berdiam di daerah gurun. Ternak yang dipelihara adalah jenis hewan ternak besar yaitu, domba, biri-biri, dan unta (www.google.com, diakses pada tanggal 18/02/2014 pada pukul 13:15. WIB)

- Pertambangan

Sektor pertambangan juga mendukung perekonomian Mesir. Pertambangan di Mesir yang telah berkembang antara lain, adalah minyak bumi, fosfat, bijih besi, dan mangan. Daerah Gurun Barat yang kering ternyata banyak mengandung minyak bumi. Selain di Gurun Barat, minyak bumi terdapat pula di sekitar Terusan Suez dan lepas Pantai Sinai. Mangan terdapat di Semenanjung Sinai. Pertambangan bijih besi terdapat di sekitar Bendungan Aswan. Hasil tambang lainnya antara lain, gips, wolfram, dan asbes dalam jumlah kecil (Elaine Jackson, 2007 : 22).

- Perindustrian

Industri utama Negara Mesir adalah tekstil. Negara Mesir mengembangkan industri tekstil dengan bahan-bahan katun, wol, dan rayon. Industri lainnya adalah pupuk, semen, industri besi, baja, bahan kimia, dan mobil. Daerah perindustrian Negara Mesir terdapat di, Iskandariyah, Kairo, Delta Sungai Nil, dan lepas Pantai Sinai (Elaine Jackson, 2007 : 26).

- Perdagangan dan pariwisata

Perekonomian Negara Mesir juga sangat tergantung pada aktivitas perdagangan. Ekspor utama Mesir adalah minyak bumi, kapas, benang tenun, tekstil, fosfat, dan buah-buahan seperti kurma. Negara tujuan utama ekspornya adalah Perancis, Italia, Amerika Serikat, Belanda, dan Rusia. (Elaine Jackson, 2007 : 22-26). Sektor pariwisata sangat besar pula peranannya pada perekonomian Mesir. Sektor transportasi misalnya berupa pendapatan dari yang diperoleh dari Terusan Suez, yang sangat membantu perekonomian Mesir (Elaine Jackson, 2007 : 20).

f. Kebudayaan Mesir

Mesir sangat terkenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dunia pada zaman purba. Peninggalan-peninggalan kebudayaan Mesir, seperti piramida, sphinx, obelisk, dan hieroglif. Piramida terdapat di Giza dan Sakara. Sphinx terdapat di Sakara. Sphinx di bangun 5000 tahun yang silam. Piramida merupakan kuburan para raja. Sphinx adalah patung berkepala manusia berbadan singa yang dimaksudkan untuk melindungi makam para raja. Obelisk adalah tugu segi empat terbuat dari batu. Hieroglif adalah tulisan dan lukisan pada peninggalan kuno (Elaine Jackson, 2007 : 20-21). Universitas Al-Azhar adalah universitas di Kairo yang merupakan universitas tertua di dunia yang dibangun pada tahun 910 M. Banyak mahasiswa Islam dari berbagai negara menuntut ilmu di universitas tersebut.

g. Provinsi Negara Mesir

Mesir dibagi menjadi 26 provinsi yakni : Aswan, Asyut, Al-Bahr al-ahmar, Bani suwayf, Al Buhayrah, Bur Said, Ad Daqoliyah, Dumyat, Al-Fayyum, Al-Gharbiyah, Al-Iskandariyah, Al-Ismailiyyah, Janub Sina, Al-Jizah, Kafr ash-shaykh, Matruh, Al minufiyah, Al-minya, Al-qohiroh, Al-qolyubiyah, Qina, Shamal Sina, Ash- Sharqiyah, Suhaj, As-suways, Al-wadi Al jaded (Agastya ABM, 2013 : 46)

2. SEJARAH PEMERINTAHAN MESIR (1953-2013)

Negara Mesir pasca revolusi 1952, sejak lengsernya Raja Al Farouk, memiliki dinamika tersendiri di negara piramida tersebut. Setiap pergantian Presiden memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Pengangkatan dan penurunan presiden Mesir di

masing-masing jamannya, memiliki problematika tersendiri. Tercatat sebanyak lima presiden Mesir yang telah berganti sejak 1953-2013 (Agastya ABM, 2013: 42- 43)

a. Gamal Abdul Nasser

Gamel Abdul Nasser lahir [15 Januari 1918](#) dan meninggal [8 September 1970](#). Gamal Abdul Nasser diangkat menjadi presiden kedua Mesir pada umur 52 tahun. Gamal Abdul Nasser merupakan salah seorang negarawan [Arab](#) yang paling terkemuka dalam sejarah. Gamal Abdul Nasser dilahirkan di [Iskandriyah](#) (Alexandria) dan aktif dalam pergerakan menentang penjajahan dan kekuasaan asing ketika menjabat di Akademi Militer. Gamal Abdul Nasser berpangkat [Mayor](#) ketika terlibat dalam [Perang Kemerdekaan Israel](#) pada tahun [1948](#). Selama beberapa bulan pada akhir peperangan, Gamal Abdul Nasser dan pasukannya terperangkap dalam kawasan yang dikenal sebagai "[Poket Faluja](#)". Ketika perdamaian tercapai, Gamal Abdul Nasser kembali ke Mesir. Tahun 1952, Gamal Abdul Nasser memimpin Angkatan Bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja [Farouk I](#) (www.google.com, diakses pada tanggal 21/2/2014 pukul 13:20 WIB)

Pada awal [1954](#), Gamal Abdul Nasser menangkap dan menahan Presiden Mesir ketika itu, jendral [Muhammad Naguib](#), dan pada [25 Februari](#) 1954 Gamal Abdul Nasser menjadi Kepala Negara Mesir. Dua tahun kemudian, Gamal Abdul Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilu presiden dan dilantik menjadi presiden [Mesir](#) kedua. Pada masa pemerintahannya, Gamal Abdul Nasser membangkitkan Nasionalisme Arab dan Pan Arabisme, merebut [terusan Suez](#), sehingga Mesir berhadapan dengan [Perancis](#), [Inggris](#) dan [Israel](#) yang memiliki kepentingan terhadap terusan itu. Krisis ini berakhir dengan keputusan dunia Internasional yang

menguntungkan Mesir serta terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Pemerintah Mesir kemudian mengadakan proyek infrastruktur besar-besaran diantaranya adalah proyek [Bendungan Aswan](#) dengan bantuan pemerintah [Uni Soviet](#)(www.google.com, diakses pada tanggal 11/3/2014 pukul 13:21 WIB)

Setelah kalah [perang](#) dengan [Israel](#) pada tahun [1967](#), Gamal Abdul Nasser ingin menarik diri dari dunia politik tetapi rakyat Mesir menolaknya. Gamal Abdul Nasser sekali lagi memimpin Mesir dalam Peperangan [1969-1970](#) ([War of Attrition](#)). Gamal Abdul Nasser meninggal pada tanggal [28 September 1970](#) akibat penyakit jantung. Gamal Abdul Nasser digantikan oleh [Anwar Sadat](#) sebagai presiden Mesir (Agastya ABM, 2013 : 43)

b. Anwar Sadat

[Jenderal Besar](#) Muhammad Anwar Al Sadat, lahir di [Mit Abu Al-Kum, Al-Minufiyah, Mesir](#). Anwar Sadat lahir pada [25 Desember 1918](#). Anwar Sadat meninggal di [Kairo, Mesir, 6 Oktober 1981](#) pada usia 62 tahun. Anwar Sadat seorang [tentara](#) dan [politikus Mesir](#). Anwar Sadat menjabat sebagai [Presiden](#) ketiga Mesir pada periode [15 Oktober 1970](#) hingga terbunuhnya pada [6 Oktober 1981](#). Orang barat menganggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di [Mesir](#) dan di [Timur Tengah](#) dalam sejarah modern. Anwar Sadat dilahirkan dari keluarga Mesir-sudan dengan 12 saudara laki-laki dan perempuan. Ayah Anwar Sadat adalah seorang Mesir, sementara ibunya orang [Sudan](#). Anwar Sadat lulus dari Akademi Militer kerajaan di [Kairo](#) pada 1938. Anwar Sadat bergabung dengan [gerakan perwira](#), yang bertekad untuk membebaskan Mesir dari kekuasaan [Britania Raya](#) (www.google.com, diakses pada 17/3/2014 pukul 16:20 WIB).

[Perang Dunia II](#), Anwar Sadat dipenjarakan oleh Britania atas usaha-usahanya untuk mendapatkan bantuan dari [kekuatan poros](#) dalam mengusir pasukan-pasukan pendudukan Britania. Anwar Sadat ikut serta dalam [kudeta](#) 1952 yang menggulingkan Raja [Farouk II](#). Ketika revolusi meletus, Anwar Sadat diperintahkan mengambil alih jaringan radio dan mengumumkan pecahnya revolusi kepada rakyat Mesir. Tahun [1964](#), setelah memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan [Mesir](#). Anwar Sadat dipilih oleh Presiden [Gamal Abdul Nasser](#) untuk menjabat sebagai [Wakil Presiden](#). Ia menduduki jabatan itu hingga [1966](#), [1969](#) hingga [1970](#). (Agastya ABM, 2013 :48)

Setelah [Nasser](#) meninggal, Anwar Sadat dilantik menjadi [Presiden](#). Tahun 1973, Anwar Sadat, bersama-sama dengan [Hafez Al Assad](#) memimpin Mesir dalam [Perang Yom Kippur](#) melawan [Israel](#), untuk merebut kembali [semenanjung Sinai](#), yang diambil oleh [Israel](#) ketika [Krisis Terusan Suez 1956](#) dan [Perang Enam Hari](#). Pertentangan antara menang dan kalah masih menjadi pertentangan, hasil [Perjanjian Camp David](#) yang menetapkan Sinai kembali ketangan Mesir. Keberhasilan Anwar Sadat menaikkan moral rakyat [Mesir](#) dan Dunia [Arab](#) serta mengadakan untuk perjanjian damai beberapa tahun berikutnya (Afaf Lutfi Al Sayyid Marsot, 2007 :156-157)

Perjanjian damai *Camp David* yang diprakarsai [Jimmy Carter](#) dan [Henry Kissinger](#) memang mengembalikan wilayah Mesir yang sebelumnya direbut oleh Israel pada perang 1967. [Dataran Tinggi Golan](#) tetap menjadi milik Israel saat perang 1967. Meski secara politik, perang Yom Kippur atau Perang Ramadhan 1973 itu menguntungkan dunia Arab, masalah [Palestina](#) dan Jerusalem Timur yang direbut

Israel pada perang 1967 masih mengganjal bahkan beberapa kalangan mengatakan dilupakan. Hal ini membuat kemarahan dari kalangan [PLO](#), kaum fundamentalis dan pergerakan [Islam](#) dan kalangan Palestina serta dunia Arab, terutama setelah kunjungannya ke Jerussalem atas undangan Manachem Begin (Afaf Lutfi Al Sayyid Marsot, 2007 : 157-161)

Pada tahun [1977](#), Anwar Sadat mengadakan kunjungan ke [Jerusalem](#) atas undangan [Perdana Menteri Israel](#), [Menachem Begin](#) yang merupakan awal perundingan perdamaian antara [Israel](#) dan [Mesir](#). Pada tahun 1978, terciptalah [Perjanjian Damai Camp David](#), yang mana Anwar Sadat dan [Menachem Begin](#) menerima [Hadiah Nobel Perdamaian](#). Bagaimanapun tindakan ini ditentang hebat oleh dunia [Arab](#). Banyak yang percaya bahwa hanya dengan ancaman militer dapat memaksa [Israel](#) berunding mengenai [Palestina](#), dan [Perjanjian Damai Camp David](#) menyingkirkan [Mesir](#). Saat itu Mesir memiliki kekuatan militer di dunia Arab yang signifikan (Mustofa Abdul Rahman, 2013 : 15)

Pada [September 1981](#), Anwar Sadat mengenakan tindakan represif kepada organisasi pergerakan Islam yang dianggapnya fundamentalis, termasuk kumpulan pelajar, dan organisasi [Koptik](#), yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas nasional Mesir, dengan mengadakan tindakan penangkapan dan penahanan menyebabkan dia dikecam diseluruh [dunia](#) diatas pelanggaran [HAM](#) dalam tindakannya itu. Tanggal [6 Oktober 1981](#), Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh anggota tentara [Jihad Islam](#). Hal ini merupakan organisasi muslim Mesir berhaluan keras yang menentang perjanjian damai Mesir dengan [Israel](#). Tindakan represif anggota Jihad Islam terlihat dalam peristiwa

[September](#). Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden [Husni Mubarak](#).

(Mustofa Abdul Rahman, 2013 : 15)

c. Husni Mubarak

Husni Mubarak lahir pada 4 Mei 1928 di Kafr El-Meselha, Al Monufiyah, Mesir. Saat masih belajar di perguruan tinggi, Mubarak bergabung dengan Akademi Militer Mesir hingga meraih gelar *Bachelor's Degree* dalam Pengetahuan Militer pada tahun 1949. Tahun 1950, Mubarak bergabung dengan Akademi Angkatan Udara dan kembali meraih gelar *Bachelor's Degree* untuk Pengetahuan *Aviation*. Mubarak mengajar di Akademi Angkatan Udara pada periode 1952-1959. Tahun 1964, Mubarak diangkat sebagai Kepala Delegasi Militer Mesir untuk USSR (Agastya ABM, 2013:49)

Husni Mubarak setelah bergabung di Akademi Militer FROUNZ Uni Soviet, Mubarak menjadi Komandan Pangkalan Angkatan Udara Barat Kairo pada tahun 1964. Mubarak menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Tahun 1969, Mubarak menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Komandan Angkatan Udara sekaligus Wakil Menteri Peperangan 1972. Tahun 1974, Mubarak dipromosikan ke peringkat Letnan Jendral dan Wakil-Presiden Republik Arab Mesir tahun 1975 (Agastya ABM, 2013 : 50)

Tahun 1979, Mubarak menjabat Wakil Presiden Partai Demokratik Nasional (NDP) dan langsung menjabat Presiden Republik Arab Mesir pada 1981. Tahun 1982, Mubarak menjabat Presiden Partai Demokratik Nasional dan terpilih kembali sebagai presiden 1987. Periode 1989-1990, Mubarak menjabat Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Mubarak terpilih kembali sebagai presiden pada 1993 dan

menjabat lagi sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika (OAU) pada periode 1993-1994. Sejak Juni 1996, Mubarak menjabat Ketua Umum *Arab Summit*. Mubarak terpilih kembali sebagai presiden pada 1999 dan menjabat Ketua Umum G-15 pada periode 1998-2000 (Agastya ABM, 2013 : 51)

Saat pemerintahan Mubarak, Mesir menjadi anggota sekutu pada Perang Teluk di tahun 1991. Keterlibatan Mesir dalam koalisi ini dinilai krusial oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menjaring dukungan negara-negara Arab dalam pembebasan Kuwait. Selain memperkuat posisi Mesir di dunia Arab, keterlibatan ini juga membawa keuntungan finansial bagi pemerintah Mesir karena setelah Perang Teluk berakhir, beberapa negara seperti: Amerika, negara-negara Arab di Teluk Persia dan Eropa menghapuskan hutang Mesir senilai 14 milyar dolar Amerika (www.google.com, diakses pada tanggal 21/2/2014 pukul 15:45 WIB)

Husni Mubarak lebih fokus pada masalah keamanan dibanding presiden-presiden sebelumnya, sehingga di awal pemerintahannya ia memperbesar *Mabahith Amn Ad-Dawla*, badan investigasi keamanan negara Mesir dan Badan Keamanan Pusat, badan anti huru-hara. Tujuan diperkuat keamanan Mesir agar Mubarak tidak dilengserkan. Tahun 2005 *Freedom House*, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian mengenai demokrasi, melaporkan bahwa pemerintah Mesir di bawah Mubarak membuat peraturan yang menyuburkan korupsi. Perhitungan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index, CPI*) yang dilakukan oleh *Transparency International* kepada 178 negara memberikan nilai 3,1 kepada Mesir dalam skala 10 adalah sangat bersih dan skala 0 adalah sangat korupsi (Apriyadi Tamburaka, 2011: 72)

Demonstrasi massa yang memprotes kepemimpinan Mubarak di Tahrir Square sejak 25 Januari 2011 berhasil menumbangkannya pada 12 Februari 2011. Tanggal 1 Februari 2011, Mubarak berjanji akan menggelar pemilu presiden pada bulan September, dan berjanji mengamandemen konstitusi. Keputusan tersebut ditolak oleh rakyat Mesir. Demonstran menekannya untuk mundur secepatnya. Tanggal 12 Februari 2011 Wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan mundurnya Mubarak melalui televisi nasional Mesir dan menyerahkan kekuasaannya kepada militer (Apriyadi Tamburaka, 2011: 91).

sejak terjang Mubarak selama menjadi presiden Mesir Tahun 1981, Mubarak menerapkan hukum darurat di Mesir yang membuat kekuasaan polisi sangat luas. Hal ini untuk mencegah demonstrasi dan organisasi politik lainya tumbuh subur, terutama organisasi Islam. Salah satu langkah awal Mubarak saat berkuasa adalah Mesir tetap setia pada perjanjian Israel 1979. Mesir menjadi negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel. Mubarak menjadi mediator utama dalam proses perdamaian Arab-Israel. Mubarak menjadi sekutu terkuat Amerika Serikat di Timur Tengah. AS mensuplai militer Mesir dengan bantuan miliaran dolar AS per tahun demi menjaga hubungan baik dengan Israel. Mubarak mengakali konstitusi Mesir dengan melarang partai politik berlandaskan agama ikut pemilu. Hal ini untuk mencegah Ikhwanul Muslimin masuk ke pemerintahan dan terlibat di politik. Mubarak sudah tiga kali terpilih menjadi presiden Mesir. Satu referendum, ia memenangkan 90 persen suara rakyat (Afaf Lutfi Al Sayyid Marsot, 2007 :170-172)

Tahun 2005, untuk pertama kalinya Mubarak mengizinkan Pemilihan Presiden dengan kandidat lebih dari satu. Tetapi dalam pilpres tahun 2005, Mubarak memenangkan pemilu melawan 10 capres lainnya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Mubarak mencurangi pemilu. Pemilu parlemen, secara mengejutkan Ikhwanul Muslimin memenangi mayoritas kursi parlemen. Mubarak melakukan sabotase politik seperti mematikan partai lain, menangkap capres Ayman Nour. Mubarak meminta polisi menangkap dan menahan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin (Afaf Lutfi Al Sayyid Marsot, 2007 :175-176)



B. Demokratisasi politik Mesir

1. Latar belakang revolusi Mesir tahun 2011

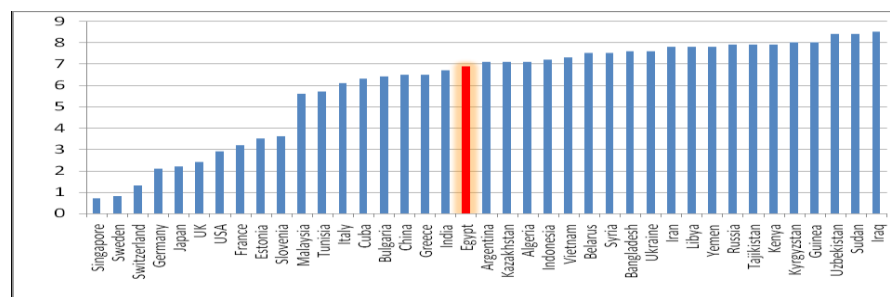
Aksi protes di Mesir pertama kali terjadi di pada tanggal 25 Januari 2011 dan terus berlangsung hingga tanggal 11 Februari 2011.(Apriyadi Tamburaka, 2011:77) Warga dari berbagai kalangan berbaaur memenuhi jalan akibat ketidakpuasan mereka terhadap keadaan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah.Rakyat Mesir melakukan aksi protes karena ketidakpuasan kinerja pemerintah di bawah kekuasaan Husni Mubarak, karena pada saat pemerintahan Mubarak terjadi beberapa hal :

a. Tingginya korupsi saat pemerintahan Husni Mubarak

Selama 30 tahun memimpin Mesir, Husni Mubarak telah banyak melakukan korupsi dalam pemerintahannya.Hampir semua dunia ketiga, masalah yang paling dominan adalah korupsi.Mesir merupakan negara terkorup peringkat 80 di dunia, meskipun tidak seburuk negara-negara lainnya, namun hal inilah yang membuat rakyat Mesir melakukan protes hingga terjadinya revolusi(Apriyadi Tamburaka, 2011 :71)Berikut tabel tingkat korupsi negara-negara di dunia pada tahun 2010 :

Gambar 3

Indeks Korupsi tahun 2010 di beberapa Negara di Dunia



Sumber:(Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 5)

Data hasil analisis (Andrey V. Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011: 5)

memaparkan tingkat korupsi Mesir dan beberapa negara di dunia

“according to Transparency International, the level of corruption in Egypt in 2010 was quite comparable with that in Italy, Greece, China, and India; meanwhile, it was lower than in Argentina, Indonesia, Viet Nam and most postSoviet countries (including Russia). On the whole, it is obvious that if the Egyptian level of corruption was a sufficient cause for sociopolitical uprisings, revolutions should be currently blazing in most countries of Asia, Africa, Latin America, and Eastern Europe”.

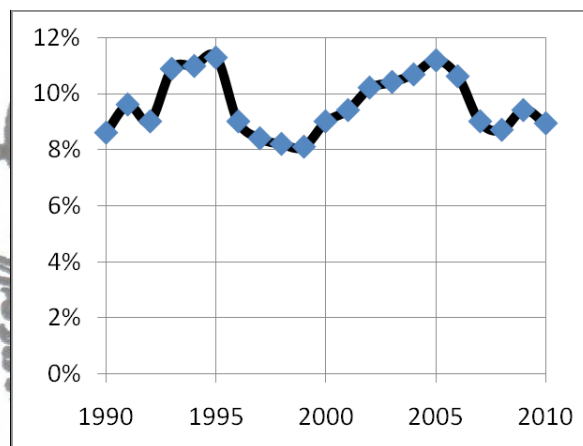
Transparansi Internasional menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Mesir pada tahun 2010 cukup sebanding dengan Italia, Yunani, China, dan India. Sementara itu, tingkat Korupsi Mesir lebih rendah dibandingkan Argentina, Indonesia, Vietnam dan Rusia. Secara keseluruhan, jelas bahwa jika tingkat korupsi Mesir adalah faktor penyebab pemberontakan sosial politik. Besarnya tingkat korupsi Revolusi harus terjadi di sebagian besar negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Negara Mesir bukanlah negara terkorup di dunia, namun rakyat Mesir berharap agar Mesir menjadi negara yang bersih, karena korupsi adalah salah satu tindakan yang paling merugikan rakyat. Data diatas menunjukkan bahwa negara Singapore, Swedan, Switzerland, Germany, Japan, UK, dan USA merupakan negara yang paling rendah tingkat korupsinya. Negara Iraq, Sudan dan Uzbekistan menempati urutan tertinggi tingkat korupsinya.

b. Banyaknya pengangguran

Dinamika pengangguran di Mesir tampak seperti berikut :

Gambar 4

Grafik pengangguran tahun 1990-2010



Sumber : (Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 6)

Data diatas menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir pengangguran Mesir dalam keadaan berfluktuasi pada tingkat yang cukup tinggi, pada indeks 8%-12%. Pengangguran di Mesir jika dibandingkan dengan negara yang lain, Mesir bukanlah negara yang paling banyak pengangguran, hal ini di kemukakan oleh pendapat:

“unemployment level in prerevolutionary Egypt could not be called “extremely low”, but against the global background Egypt compared rather well. Its unemployment level was less than in the USA, the EU, France, Poland, Turkey, Ireland, almost twice lower than in Latvia and Spain etc.

Tingkat pengangguran di Mesir sebenarnya tidak dapat dikatakan sangat buruk, jika dibandingkan dengan negara lain, namun ada beberapa hal yang menjadikan revolusi tahun 2011 meledak, yaitu banyaknya

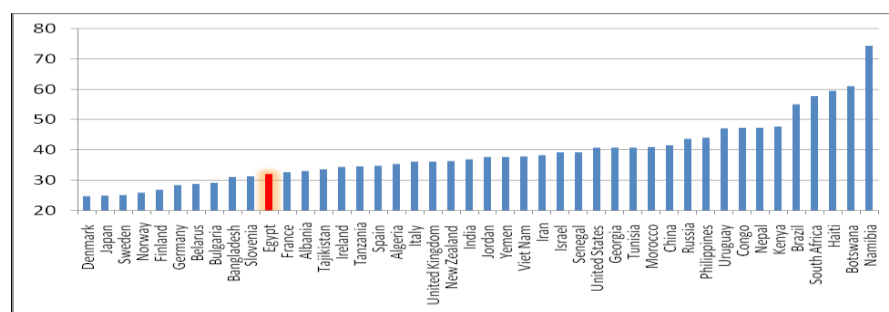
jumlah pemuda usia produktif yang menganggur. Hal ini, Mesir mengalami permasalahan yaitu pengangguran anak muda di Usia Produktif yaitu pada umur 20-24 tahun. Menurut pengamatan pada saat protes demonstrasi besar yang terjadi di Mesir, 2,5 juta anak muda yang melakukan aksi demonstrasi. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi motor penggerak aksi demonstrasi di Mesir. Pengangguran terbanyak bukan karena anak muda itu tidak berpendidikan, justru sebaliknya, di negara Mesir pengangguran terbanyak adalah lulusan universitas, sebanyak 43%. Sehingga hal inilah yang menjadikan pemuda-pemuda Mesir melakukan aksi demonstrasi atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang menimpa diri mereka (Andrey V. Korotayev dan Julia V. Zinkina, 2011 : 6).

c. Kemiskinan dan Rendahnya Pendapatan Penduduk

Masalah kemiskinan yang terjadi di Mesir yang menjadi salah satu penyebab terjadinya Revolusi pada tahun 2011. Mesir merupakan negara dengan tingkat kategori cukup miskin jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia.

Gambar 5

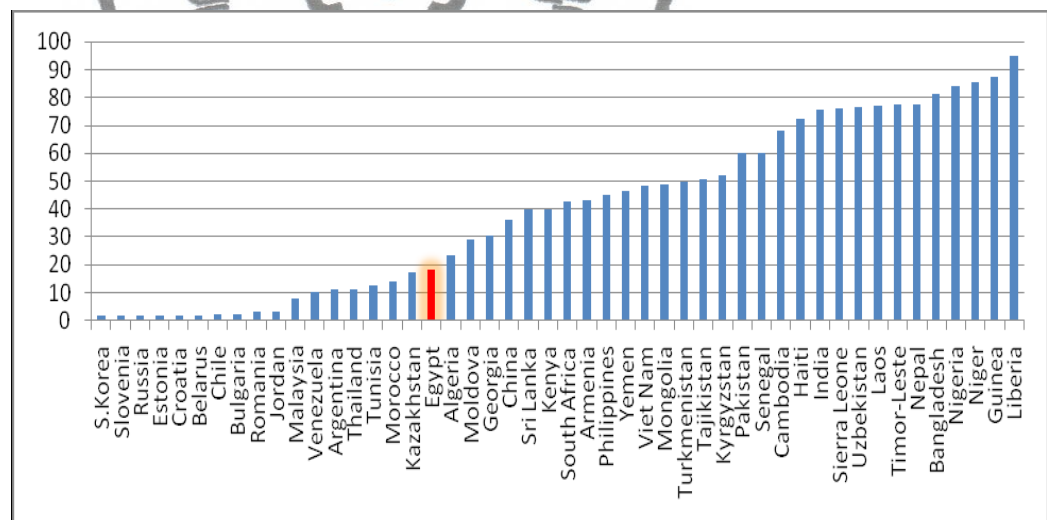
Grafik kemiskinan di dunia tahun 2000 - 2010



Sumber : (Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 9)

Tingkat kemiskinan Mesir tidak seburuk dengan negara Denmark, japan, sweden, Norway, Finland, Germany, Belarus, Bulgaria, Bangladesh, Slovenia. Kemiskinan sangat terpengaruh dengan pendapatan penduduk Mesir. Rata-rata pendapatan Penduduk Mesir \$125-\$2 per hari. Hal ini merupakan angka yang cukup memprihatinkan. Tabel berikut akan menggambarkan tingkat pendapatan penduduk di beberapa negara di dunia(Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 9)

Gambar 6
Grafik pendapatan penduduk di beberapa Negara



Sumber : (Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 5)

Melihat data diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan 20% penduduk mesir kurang dari \$2. Tingkat kemiskinan dan pendapatan seperti yang telah dijelaskan di atas, rakyat Mesir menginginkan perubahan untuk diri mereka yang lebih baik, karena rakyat Mesir mengalami kekecewaan

atas kepemimpinan Mubarak selama 30 tahun (Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 5)

4. Harga Kebutuhan Pokok

Rendahnya pendapatan penduduk Mesir ditambah dengan naiknya harga kebutuhan pokok menjadikan penderitaan rakyat Mesir semakin menumpuk. Melonjaknya harga pangan disebabkan juga oleh faktor krisis global. Negara berkembang di seluruh dunia mengalami dampak krisis global. Mesir merupakan negara yang bergantung impor pangan. Sebab inilah yang menjadikan kemarahan rakyat Mesir untuk melakukan aksi protes (Andrey V.Korotayev dan Julia V Zinknia, 2011 : 15)

Berbagai kalangan demonstran oposisi, dari berbagai umur, bergabung bersama menyerukan kekecewaan terhadap pemerintahan. Pemerintah menanggapi demonstrasi tersebut dengan keras dan tidak menolerir pemberontakan yang direncanakan. Husni Mubarak yang saat itu menjabat presiden menghimbau bahwa masyarakat jangan meniru perjuangan yang dilakukan aktivis di Tunisia. Mubarak menghimbau bahwa keamanan negara adalah prioritas utama dan harus terus diperjuangkan meskipun menimbulkan kerugian (Apriadi Tamburaka, 2011 : 85)

Demonstrasi yang terus bergulir dan menjadi semakin besar mengakibatkan pihak pemerintah mengeluarkan reaksi keras dan mengerahkan tenaga keamanan untuk menertibkan para demonstran. Pihak polisi bertindak keras para demonstran sehingga timbul banyak korban di

kedua pihak. Polisi seringkali membubarkan kerumunan massa dengan bantuan kendaraan militer seperti panzer dan mobil anti huru – hara. Tindakan yang dilakukan polisi ini menyulut reaksi dunia yang menganggap bahwa perlakuan aparat keamanan terhadap demonstran berlebihan. Tetapi bentrokan yang terjadi tidak hanya antara aparat keamanan dengan demonstran yang menginginkan Mubarak untuk mundur, tetapi juga dengan pihak yang pro dengan pemerintahan dan Mubarak. Demonstran pro Mubarak mengendarai onta dan kuda untuk membubarkan demonstrasi menentang pemerintahan. Bentrokan pun tidak dapat dihindari dan korban jiwa di kedua pihak pun semakin bermunculan (Apriadi Tamburaka, 2011 :86-87)

Demonstrasi yang terjadi di Mesir belakangan ini disebabkan oleh pihak oposisi yang berusaha mencontoh apa yang terjadi di Tunisia. Ketika demonstrasi yang dilakukan warga Tunisia dinilai telah berhasil menjatuhkan rezim, pihak oposisi mendapat keberanian untuk menggelar hal yang serupa di Mesir. Efek domino dari kejadian di Tunisia tersebut berkembang menjadi gerakan massa yang semakin besar dari hari – kehari. Gerakan massa tersebut disebabkan karena masyarakat dinilai sudah jenuh dengan pemerintahan otoriter Husni Mubarak yang telah Mubarak jalankan selama 30 tahun (Apriadi Tamburaka, 2011 :11). Aksi rakyat Mesir selama 18 hari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Kronologi Mesir tahun 2011

Waktu Peristiwa	Peristiwa	Sumber
25 Januari 2011	Warga mulai berdemonstrasi menentang pemerintah yang diikuti ribuan warga di Kairo dan berbagai propinsi lainnya.	Agastya ABM, 2013 :57
26 Januari 2011	Demokrasi masih terjadi, jumlah korban tewas mencapai lima orang, dan puluhan cedera. Ratusan orang ditangkap termasuk delapan wartawan dan jurnalis. Seluruh jaringan internet diputus	www.beritasatu.com diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB
27 Januari	Demonstrasi berlanjut di beberapa provinsi di Mesir menuntut Husni Mubarak lengser. El Baradei siap mengamankan negara.	Agastya ABM, 2013 :57
28 Januari 2011	Demonstrasi semakin besar, terjadi bentrokan antara militer dan demonstran. Mubarak membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru.	Apriadi Tamburaka, 2011 :76

29 Januari 2011	Ketua Dinas Intelijen Mesir, Omar Suleiman, diangkat sebagai Wakil Presiden, dan Ahmad Shafiq, yang dulu menjabat sebagai menteri penerbangan sipil, ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru. Aksi demonstrasi memakan puluhan korban	Agastya ABM, 2013 :58
30 Januari 2011	Jumlah demonstiran di Bundaran Tahrir, Kairo mencapai puluhan ribu orang. Amerika meminta Husni Mubarak untuk lengser.	Apriadi Tamburaka, 2011 :76
31 Januari 2011	Adanya tindakan dari pemerintahan untuk membuka lapangan pekerjaan dan amandemen undang-undang dasar dan reformasi dewan yudikatif.	www.beritasatu.com diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB
01 Februari 2011	Aksi demo di ikuti jutaan orang, memaksa Husni Mubarak untuk menyerahkan jabatannya.	Agastya ABM, 2013 :58
02 Februari 2011	Demonstrasi membanjiri Bundaran Tahrir di Kairo mereka menolak meninggalkan bundaran tersebut.	Agastya ABM, 2013 :58
03 Februari	Sekelompok orang bersenjata pro-	Agastya ABM, 2013

2011	Mubarak menembaki warga di Bundaran Tahrir. Aparat keamanan Mesir juga menginstruksikan para wartawan agar segera meninggalkan hotel-hotel di sekitar Bundaran Tahrir.	:59
04 Februari 2011	Lebih dari satu juta warga Mesir menggelar shalat Jumat di Bundaran Tahrir, dan khatib shalat menuntut masyarakat untuk tetap bertahan hingga tergulingnya rezim Mubarak.	Agastya ABM, 2013 :59
05 Februari 2011	Pemerintah masih mempertahankan jabatannya	www.beritasatu.com diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB
06 Februari 2011	Kelompok-kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin berunding dengan Wakil Presiden, Omar Suleiman.	Agastya ABM, 2013 :59
07 Februari 2011	Tuntutan pengadilan terhadap Habib al-Adli, mantan menteri dalam negeri Mesir.	www.beritasatu.com diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB
08 Februari	Pengawas hak asasi manusia	www.beritasatu.com

2011	mengkonfirmasi tewasnya 300 orang dalam demonstrasi di Mesir. Para demonstran memblokir gedung parlemen dan kabinet.	diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB
09 Februari 2011	Dalam bentrokan antara pasukan polisi dan para demonstran di kota al-Kharga, di Propinsi al-Wadi al-Jadid, empat orang tewas dan 100 orang cedera.	Agastya ABM, 2013 :60
10 Februari 2011	Husni Mubarak menemui demonstran dan mengatakan tidak akan mengundurkan jabatannya. Para demonstrasi semakin marah.	Agastya ABM, 2013 :60
11 Februari 2011	Pemerintah menyiarkan pemunduran Husni Mubarak. Seluruh demonstran gembira. Akhirnya aksi 18 hari menuai hasil	Agastya ABM, 2013 :58

Kondisi Mesir tahun 2011 sedang mengalami masa transisi. Masa Transisi (Huntington, 1991 dalam Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :14-16) adalah masa ketika elemen rakyat menuntut sebuah perubahan pemerintahan dari otoriter menuju demokrasi. Fase transisi demokrasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Tahapan persiapan, bercirikan perjuangan politik untuk menjatuhkan rezim non-demokratis.
2. Tahapan keputusan, yang didalamnya terdapat elemen jelas dari tertib demokrasi telah dibangun.
3. Tahapan konsolidasi, yang didalamnya demokrasi baru lebih berkembang dan akhirnya praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik sehingga demokrasi yang sesungguhnya akhirnya dihasilkan oleh inisiatif umat manusia.

Transisi demokrasi yang terjadi di Mesir adalah transisi melalui jalur dari bawah (*replacement*), dimana transisi dilakukan oleh pihak oposisi atau rakyat. Rakyat Mesir bersama pihak oposisi sebagai pelaku transisi dan berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan sang presiden dengan melakukan protes dan demonstrasi secara besar-besaran (www.google.com, diakses pada tanggal 10/3/2014 pukul 12.30 WIB)

Transisi menuju demokrasi dalam suatu negara merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar setiap rakyat di negara tersebut mendapatkan kebebasan hak mereka, mulai dari kebebasan berpendapat hingga mendapatkan derajat yang sama antar warga negara dalam berpolitik. Membahas tentang demokrasi, Mesir belum sepenuhnya menerapkan demokrasi. Pemilu sudah terlaksana, namun pemilu tersebut hanyalah cover yang dilakukan Mubarak untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya pada tahun 2005. Sementara rakyat masih belum mendapatkan kebebasan bicara dan kurangnya pemilu yang bebas, jujur dan adil. Rakyat belum dapat menyuarakan aspirasi sebagaimana negara demokrasi pada umumnya, dikarenakan terbatasnya

freedom of speech di Mesir pada saat itu (Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013 :27)

Beberapa hari sebelum mundurnya Mubarak dari jabatan sebagai seorang presiden, Mubarak sempat mengatakan akan membentuk pemerintahan baru, dan tidak akan mengundurkan diri. Ucapan Mubarak tersebut tidak didengar, karena masyarakat sudah terlanjur sakit hati. Hingga akhirnya setelah 18 hari demonstrasi dilakukan, sang presiden menyerah dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pemimpin tertinggi Mesir. Mubarak menyerahkan kekuasaannya terhadap pemerintahan militer yang dipimpin oleh Hussein Tantawi (www.google.com, diakses pada tanggal 1/1/2014 pukul 10:45 WIB)

Pasca Husni Mubarak turun, ternyata rakyat Mesir masih melakukan demonstrasi, apa yang mereka inginkan, tidak cukup hanya Mubarak saja yang turun, masih banyak keluhan rakyat Mesir yang meminta pemerintah untuk turun tangan dalam beberapa aspek kehidupan mereka, selama ini kehidupan rakyat Mesir sangat tidak menyenangkan, banyak hal yang perlu diperbaiki bersama antara pemerintah dan juga rakyat.

Keluhan para demonstran terfokus pada masalah hukum, politik, dan ekonomi. Para demonstran meminta tatanan Negara diperbaiki, mulai dari perbaikan citra polisi, yang selama ini terkenal dengan kebrutalannya. Selama rezim Mubarak berkuasa, polisi di Mesir sering bertindak diluar aturan, pemerintah sendiri sempat membantah tuduhan tersebut, namun bukti-bukti konkrit telah membuktikan bahwa selama ini polisi bertindak bukan sebagai pelindung masyarakat, namun sebaliknya, mereka malah berbuat tidak sepatutnya terhadap masyarakat Mesir. Ketakutan

masyarakat akan aparat keamanan tersebut mendasari banyak rakyat Mesir menginginkan perubahan sistem perpolitikan (www.google.com, diakses pada tanggal 12/2/2014 pukul 13:45 WIB)

Selain bobroknya aparat kepolisian, rakyat Mesir menuntut pemerintah untuk menghapuskan hukum darurat. Hukum darurat ini merupakan sistem hukum yang dipakai di Mesir sejak kepemimpinan presiden Anwar Sadat yang diberlakukan sejak tahun 1967. Hukum tersebut sempat ditangguhkan pada tahun 1980, namun diberlakukan lagi setelah pembunuhan Sadat. Hukum ini memberikan pemerintah kekuasaan yang sangat luas, hak-hak konstitusional ditangguhkan, sensor disahkan, dan pemerintah dapat memenjarakan seseorang tanpa batas waktu dan tanpa alasan. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan prinsi-prinsip demokrasi yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan pengadilan seadil-adilnya. Rakyat Mesir berusaha agar pemerintah menghapuskan hukum darurat tersebut sebagai bentuk kebebasan negara demokrasi (Apriadi Tamburaka, 211: 73)

Rakyat masih meminta untuk diadakan pemilu secara demokratis di karena khawatir akan pemerintahan yang dikendalikan oleh militer kembali terjadi. Rakyat menginginkan pemilu demokratis dan pemerintahan militer menjanjikan hal itu dalam waktu 5 bulan. Pertengahan tahun 2011 pemilu juga tidak dilaksanakan. Demo terus berlanjut, hingga akhirnya pemerintah militer mengadakan pemilu pada awal 2012. (Mustofa Abdul Rahman, 2013 :1)

2. Kondisi Pemerintahan Mesir tahun 2012

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan- keputusan politik

digunakan secara langsung oleh setiap warga negaranya yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. (Sartori, 1962:5).

Pandangan struktural demokrasi yaitu sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus (Alfian, 1978:236 dan Surbakti, 1999 :228). Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, diantara lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga demokrasi mengatur dan menyalurkan konflik hingga ke penyelesaiannya. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu. Robert Dahl (1973 : 7) mengemukakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga di negaranya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi.
2. Kebebasan mengemukakan pendapat.
3. Hak memilih dalam pemilihan umum, hak untuk menduduki jabatan publik.
4. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara.
5. Tersedianya sumber informasi alternatif.
6. Pemilu yang jujur dan adil
7. Adanya lembaga penjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Melihat syarat yang diajukan oleh Robert Dahl, maka Mesir telah memenuhi syarat pada proses pemilihan presiden tahun 2012. Syarat yang paling melekat sebuah demokrasi adalah adanya pemilu. Rakyat Mesir telah menantikan terselenggaranya pemilu. Pemilu pada tahun ini merupakan pemilu pertama kalinya diselenggarakan secara terbuka tanpa ada ancaman (Mustofa Abdul Rahman, 2013 : 11)

Berdasarkan data yang ada, 90% rakyat Mesir beragama Islam. Pro-kontra terkait sebuah sistem demokrasi juga terjadi di negeri piramida itu. Pandangan Islam, beberapa ulama memberikan pendapat tentang demokrasi. Realitanya saat ini, agama Islam sedang dihadapkan pada kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan negara-negara Islam terkait dengan sebuah sistem pemerintahan demokrasi (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 : 26)

Islam adalah agama, sebagai agama Islam diyakini sebagai perangkat ketentuan dan aturan yang bersumber dari Allah SWT. Agama dalam keseluruhan aspek ajarannya karena agama menjadi panduan bagi umat manusia. Berarti hal tersebut harus menjadi dasar bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia, antara lain perilaku politik, ekonomi, sosial (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 : 26)

Agama Islam adalah agama dari Allah SWT, yang ajarannya terkodifikasikan dalam Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an inilah yang menjadi panduan bagi umat manusia, rujukan manusia dalam berperilaku. Ajaran Allah SWT yang tertulis dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW berperan menjelaskan Al-Qur'an (*Mubāyyinul qur'ān*). Nabi Muhammad yang memberi penjelasan secara operasional terhadap ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dan As-sunnah

menjadi rujukan bagi perilaku umat Islam di dunia (Basrowi dan Suko Susilo, 2006:26)

Islam sebagai kumpulan ajaran Allah SWT, kemudian di lembaga oleh Nabi Muhammad SAW, maka dapat disimpulkan yang memiliki kemutlakan untuk mengatur adalah Allah SWT. Allah SWT memiliki kedaulatan atas manusia. Allah (*al-khāliq*) yang menentukan segala ketentuan dan aturan sekalian ciptaanya (*al-makhlūq*), termasuk di dalamnya manusia. Hal tersebut berarti, manusia harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan Allah SWT. Ketentuan dan aturan dari Allah SWT memiliki kemutlakan (*ultimate*), sehingga segala perilaku manusia dapat ditentukan oleh Allah SWT sebagai perilaku yang benar atau salah. Ketentuan hukum Allah SWT tidak dapat berubah dan berlaku sepanjang kehidupan manusia (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :26)

Pihak yang lain, mengenal adanya paham demokrasi. Menurut kamus demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang rakyat pilih secara bebas. Kaitannya dengan hal ini demokrasi adalah suatu sistem dimana warga negara bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Pendefinisian yang demikian dapat dilihat adanya implikasi antara lain terhadap cara pengangkatan kepala negara atau jajaran pejabat lembaga pemerintahan, cara pengambilan keputusan tentang suatu undang-undang atau peraturan pemerintah (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :27)

Affan Ghafar dalam Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :27 menyatakan bahwa ilmu politik membagi dua macam pemahaman terhadap demokrasi. Pemahaman secara

normatif dan pemahaman secara empiric (*procedural democracy*). Demokrasi memberikan pemaknaan bahwasanya pemerintahan hanyalah salah satu unsur yang berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi, sehingga manusia memiliki kemutlakan.

Adanya hal tersebut memberikan penekanan bahwa pemerintahan yang demokratis selalu memberikan perhatian kepada warga negaranya. Pemerintahan demokratis memberikan pelajaran bagi seluruh warga negaranya untuk bebas menentukan pilihan termasuk dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Rakyat bebas menentukan pendidikan, pekerjaan dan seluruh aspek kehidupan pribadi masyarakat tersebut. Inti pokok penjelasan ini adalah kebebasan untuk rakyat. Kebebasan tersebut juga menyangkut praktek dan prosedur. Demokrasi dapat diartikan sebagai “pelembagaan” dari kebebasan, sehingga hal tersebut secara praktek dapat dilihat dari adanya Hak Asasi Manusia, persamaan di depan hukum, dan toleransi (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :26-27)

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya ruang lingkup demokrasi adalah pada persoalan kemanusiaan, dari manusia ke manusia. Hal tersebut berarti demokrasi tidak ada intervensi yang berasal dari luar pihak kecuali Allah SWT. Demokrasi bersifat duniawi, tidak ada nilai-nilai transendental yang abadi. Salah dan benarnya demokrasi bersifat relatif, tergantung dari kesepakatan bersama dari masyarakat. Produk yang dihasilkan demokrasi hanya bersifat temporal. Islam bukanlah demokrasi, namun demokrasi memiliki nilai-nilai keislaman. Apabila Islam dan demokrasi disamakan, maka jika demokrasi mengalami konflik, berarti Islam juga berkonflik. Islam tetap menjadi agama yang memiliki ajaran suci dan demokrasi

menjadi suatu kelembagaan dari ajaran-ajaran Islam (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :29-30)

a. Islam dan Demokrasi Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Manusia

Konsep kedaulatan menurut Al Maududi dalam Basrowi dan Suko Susilo, 2006: 30 menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT. Allah SWT yang memiliki kedaulatan manusia, meliputi kehidupan moral, sosial, budaya, politik manusia. Konsep kedaulatan ini sebenarnya cukup sederhana. Kandungan Al-Qur'ān dikatakan bahwa Allah SWT adalah pencipta, pemelihara dan penguasa alam semesta ini. Merujuk pada ayat Al-Qur'ān terkait kedaulatan tuhan (*Sovereignty of god*) adalah firman Allah dalam Surat Yusuf (12):40 Juga dalam surat Al Maidah (5): 45 ditambahkan dalam surat An-Nahl (16):116. Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa ketentuan hukum merupakan otoritas Allah SWT. Allah SWT memiliki kemutlakan dalam menentukan semua ketentuan kepada manusia. Hal memerintah dan larangan yang dilakukan oleh nabi, tidak pernah lepas dari kedaulatan Allah SWT. Kedaulatan tersebut hanya dimiliki oleh Allah SWT, namun Allah SWT juga tidak dengan sendirinya menunjukkan siapa yang berwenang untuk bertindak atas kedaulatan tertinggi itu. Jaman dulu, Allah SWT mengutus para Nabi, lantassaat ini siapa yang menjadi utusan Allah SWT dalam menentukan kehidupan manusia atas kedaulatan tertinggi tersebut.

Gagasan (An-Naim dalam Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :26) memaparkan bahwa dalam mengatasi polemik ini, ia mengajukan pertanyaan “Bisakah gagasan tentang wakil kedaulatan Allah SWT dipertemukan dengan konstitusionalisme?”. Pertanyaan ini terkandung pemikiran bahwa wakil kedaulatan Allah SWT adalah

umat, totalitas rakyat negara Islam, tidak terbatas pada seseorang atau sekelompok. Umat merupakan wakil kolektif kedaulatan Allah SWT, maka umat berhak menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kepada umat sebagai agen kedaulatan Allah SWT yang asli. Gagasan demikian dapat diturunkan suatu mekanisme operasional implementasi konsep pemerintahan representatif yang bertanggungjawab. Pemikiran An-Na'im sepaham dengan apa yang disampaikan Quraish Shihab. Ada dua kata atau istilah dalam Al-Qur'an bahwasanya umat memiliki peran penting memegang wakil kedaulatan Allah di bumi. Kedua istilah tersebut *istikhlāf* dan *isti'mār*. Kata *Khalifāh* dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali dalam surat al-Baqarah(2):30 dan surat As-Shad (38):26. Surat al-Baqarah ayat 30

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. “sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau akan menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensyucikan Engkau?” “Tuhan berfirman sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Pada Q.S as- Shad(38): 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikanmu Khalifah(penguasa) di muka bumi maka berikanlah keputusan perkara diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Bahasa Arab, bentuk jama' dari kata tersebut ada dua macam *khulafā* dan *khalāif*. Masing-masing kata ini mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah SWT mengangkat Adam a.s sebagai khalifah, kata yang digunakan dalam bentuk tunggal. Redaksi dalam firman tersebut “Aku akan” Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada manusia kecuali Adama.s. Masa nabi Daud a.s ditunjukkan dengan kata berbentuk jamak, dengan redaksi “Kami telah” untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah SWT, yaitu masyarakat. Penjelasan ini menyimpulkan bahwa pengangkatan suatu khalifah dalam bentuk tataran ide mungkin bisa diangkat oleh satu oknum, jika dalam kondisi nyata, hendaknya diangkat secara bersama-sama (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 : 32) Kata *ista'mara* ditemukan dalam surat Hud (11):61 berbunyi :

وَالِىَ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ مِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمْثِلَ آدَمَ ۚ خَلَقَهُ

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Dan kepada samut(kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata : “hai kaumku sembahlah Allah sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kami dari bumi (tanah) dan jadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya tuhanku amat dekat, rahmatnya (lagi memperkenankan) doa hamba- Nya.

Kata yang mengandung arti permintaan. Ayat tersebut berarti “Dia Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan menugaskan kamu memakmurkannya”. Kata *ista'marākum* berarti “menjadikan kamu” atau “menugaskan kamu” Menurut Quraish Shihab dalil tersebut sebagai perlimpahan politik dari Allah SWT kepada

manusia. Memperhatikan pendapat An-Naim dan Quraish Shihab maka dapat dibuat suatu mekanisme konstitusional dalam membentuk suatu kekuasaan politik sebagai representasi umat. Konteks tersebut dengan mendasarkan prinsip *syura* (musyawarah) maka Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Melalui musyawarah inilah dapat dilakukan pemilihan presiden ataupun pejabat lembaga pemerintahan. Musyawarah hanya dilakukan ketika belum ditentukan petunjuknya oleh Allah SWT serta persoalan-persoalan duniawi, sedangkan persoalan ibadah *mahdhah* seperti sholat, zakat, Haji tidak perlu dimusyawarahkan (Basrowi dan Suko Susilo, 2006 :34)

Pemikiran Quraish Shihab menegaskan bahwa umat manusia khususnya umat Islam dapat mengadaptasi pokok-pokok ajaran Al-Qur'an dalam perkembangan politik modern, misalnya demokrasi. Gagasan wakil kedaulatan Allah SWT dapat dioperasionalkan melalui konstitusionalisme. Dasar penyelenggaraan mekanisme *syura* dijelaskan dalam al-Qur'an Al-Imran (3) :159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ هُمُ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan Rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya

Ada penjelasan lagi pada surat As-Syuara(42) :38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
commit to user

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Kekhalifahan kolektif dalam bentuk *Ummah* dalam suatu negara Islam dapat direfleksikan melalui syura laki-laki dan perempuan adalah sah sebagai *khalīfatullāh*. Al-Qur'an dan As-sunnah tidak memberikan perincian terkait dengan mekanisme musyawarah. Nabi bersabda "kalian lebih mengetahui persoalan dunai kalian" (HR. Imam Muslim). Paparan di atas menunjukkan bahwa demokrasi masih memiliki nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Basrowi dan Suko Susilo, 2006:37)

Tahun 2012, Mesir mengalami beberapa kronologi peristiwa seperti tabel berikut :

Tabel 3
Kronologi Pemerintahan Mesir di tahun 2012

Waktu Peristiwa	Peristiwa
28 November 2011- 15 Februari 2012	Mesir melakukan serangkaian pemilu legislatif selama beberapa pekan, di majelis rendah, kelompok Ikhwanul Muslimin memenangi hampir separuh jumlah kursi.
23-24 Mei 2012	Putaran pertama pemilihan presiden (pilpres) menjaring 13 kandidat, dan akhirnya berakhir pada persaingan Mursi dan Ahmad Shafik.
14 Juni 2012	Mahkamah Konstitusi memerintahkan dibubarkannya majelis rendah parlemen.

16-17 Juni 2012	Pilpres dilakukan, Mursi menang dengan 517% suara
30 Juni 2012	Mursi diambil sumpahnya sebagai presiden.
19 November 2012	Para anggota partai liberal di Mesir mundur dari tim perumus konstitusi.
22 November 2012	Mursi secara sepihak mengeluarkan dekrit yang menambah kekuasaannya.
30 November 2012	Kelompok Islam mempercepat perumusan konstitusi baru, dan Mursi memberi tenggat waktu hingga 15 Desember 2012 untuk dilakukan referendum.
4 Desember 2012	Lebih dari 100.000 demonstran menyerbu istana presiden menuntut dibatalkannya referendum dan perumusan konstitusi.
15 dan 22 Desember 2012	Dalam referendum dua putaran, rakyat Mesir menyetujui konstitusi baru dengan suara 63,8%, namun tingkat partisipasi rendah.

Sumber : beritasatu.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB

3. Kondisi Pemerintahan Mesir pada Tahun 2013

Pasca turunnya Husni Mubarak, sistem Pemilihan presiden di Mesir menggunakan sistem pemilihan langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam

memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Demokratisasi Mesir mengalami gejolak yang begitu luarbiasa pada saat pemilihan presiden Mesir, Ikhwanul Muslimin mengusung Muhammad Mursi. Pemilihan presiden putaran kedua, Muhammad Mursi meraih suara 51,7%, sedangkan lawannya Ahmad Syafik mendapatkan 48,3% suara. Pemerintahan Mursi memberikan sebagian jabatan dalam kabinetnya kepada tokoh-tokoh yang tadinya berada di pemerintahan interim militer, namun sikap kompromistis Mursi tak bertahan lama. Bulan Agustus 2012, Mursi mulai melakukan perombakan di tubuh pemerintahannya (M.Agastya ABM, 2013: 69)

Kebijakan saat Mursi menjabat menjadi presiden mampu menorah prestasi (M.Agastya ABM, 2013: 67). Pemerintahan Mursi menghasilkan beberapa hal yaitu :

1. Muhammad Mursi telah mengeluarkan Mesir dari ketergantungan ekonomi terhadap Amerika, dengan kesuksesannya dalam swasembada gandum berkualitas dengan harga murah.
2. Muhammad Mursi telah mencetuskan proyek raksasa di terusan Suez untuk memperbaiki kapal-kapal yang masuk Mesir. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan Mesir selama 10 tahun ke depan, dari 3 Miliar USD menjadi 100 Miliar USD.
3. Muhammad Mursi membuka zona industri, yakni dibawah naungan Qatar dan Turki.
4. Muhamad Mursi membuka cabang perusahaan Samsung untuk produksi guna membuka lapangan pekerjaan yang aman bagi rakyat Mesir.

5. Muhammad Mursi mengawasi perusahaan Ipad dengan keahlian, industri, spesifikasi Mesir.

Berbagai prestasi Muhammad Mursi menjadikan Mursi adalah orang yang paling berpengaruh di Dunia versi majalah *Time*. Majalah Internasional itu menyebut juga Muhammad Mursi sebagai orang yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah (M. Agastya ABM, 2013: 68). Majalah *Time* mengungkapkan dua alasan yang membuat Muhammad Mursi sebagai orang yang berpengaruh yaitu :

1. Muhammad Mursi merupakan sipil pertama yang terpilih menjadi Presiden Mesir melalui pemilu yang demokratis
2. Muhammad Mursi memiliki peran penting sebagai penentu konflik Timur Tengah melalui penghentian perang antara Israel dan Palestina, serta menyerukan kepada Presiden Suriah untuk mengundurkan diri.
3. Muhammad Mursi merupakan presiden yang pluralis, sehingga Ia memasukkan tokoh-tokoh non muslim ke dalam jajaran pemerintahannya.

Pasca terpilihnya pemerintahan demokratis yang menunjuk Mursi sebagai presiden pilihan rakyat, namun keberjalanan pemerintahan Muhammad Mursi tidak kunjung damai dan lancar. Kerusuhan-kerusuhan, konflik antar pejabat pemerintahan, aksi protes rakyat masih terjadi. Awal timbulnya masalah baru dalam pemerintahan Muhammad Mursi disebabkan karena adanya kekhawatiran dari beberapa kubu yang memiliki kepentingan masing-masing. Terbentuknya rancangan konsitusi Undang-Undang yang baru, yang dirumuskan oleh anggota parlemen yang saat itu anggota parlemen tersebut mayoritas terdiri dari para anggota ikhwanul Muslimin. Undang-Undang tersebut dibuat oleh Anggota Ikhwanul Muslimin, sehingga kebijakan-

kebijakan yang terumuskan dalam Undang-undang tersebut berideologi Islam, sehingga kubu-kubu yang tidak sepakat akan adanya hukum Islam menentang Undang-Undang tersebut. Tanggal 22 November 2012, Presiden Mursi mengeluarkan dekrit bahwa Undang-Undang yang telah dibuat tidak akan dibatalkan. Dekrit tersebut membuat Mursi menambah kekuasaannya, sehingga setiap keputusan yang dibuat mendapat imunitas dari pemeriksaan hukum, dan melarang pengadilan membubarkan majelis tinggi parlemen (M. Agastya ABM, 2013: 69)

Pasca dekrit tersebut, aksi protes bermunculan selama sehari-hari. Kemudian setelah adanya penolakan dari rakyat Mesir, Dewan Parlemen mempercepat perumusan konstitusi baru, dan Mursi memberi tenggat waktu hingga 15 Desember 2012 untuk dilakukan referendum. Setelah dibuat konstitusi baru, lebih dari 100.000 demonstran menyerbu istana presiden menuntut dibatalkannya referendum dan perumusan konstitusi. Hari berikutnya, kelompok Islamis menyerang demonstran sehingga pecah kerusuhan di jalan yang mengakibatkan 10 orang tewas (beritasatu.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB)

Situasi pemerintahan Mesir di awal tahun 2013 tidak semakin membaik, justru sebaliknya. Aksi demonstrasi semakin merajalela. Sejak bulan Januari 2013 hingga akhir 2013 sering terjadi aksi demonstrasi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4

Kronologi Mesir tahun 2013

25 Januari 2013	Ratusan ribu orang berdemo menentang Mursi dalam peringatan tahun kedua dimulainya perlawanan atas Mubarak.
-----------------	---

	Kerusuhan pecah di banyak tempat.
Februari.-Maret 2013	Aksi protes pecah di Port Said dan kota-kota lain selama beberapa pekan, mengakibatkan puluhan orang tewas
7 April 2013	Terjadi konflik antara kelompok Islamis dan Kristen koptik
30 Juni 2013	Jutaan orang berdemo menentang Mursi tepat pada ulang tahun pertama kekuasaannya. Sedikitnya delapan orang tewas.
1 Juli 2013	Demonstrasi berlanjut, militer Mesir memberi waktu 48 jam kepada presiden dan kelompok oposisi untuk menyelesaikan sengketa, atau mereka akan turun tangan
2 Juli 2013	Pihak militer akan mengganti Mursi, membatalkan konstitusi yang dirumuskan kelompok Islamis dan mengadakan pemilu dalam tempo satu tahun. Malamnya Mursi berpidato menyatakan tekad untuk mempertahankan legitimasi dan menolak mundur.
3 Juli 2013	Panglima militer Mesir mengumumkan Mursi telah digulingkan, Para pemimpin Ikhwanul Muslimin ditangkap. Puluhan ribu pendukung Mursi berkemah di jalanan Kairo dalam aksi demo besar-besaran.
4 Juli 2013	Ketua Mahkamah Konstitusi Adly Mansour diambil sumpah sebagai pejabat pelaksana presiden.
5 Juli 2013	Mansour membubarkan majelis tinggi yang didominasi

	kelompok Islamis, sementara konflik antara pendukung dan penentang Morsi pecah di Kairo dan Alexandria, 36 orang tewas. Petinggi Ikhwanul Muslimin Khairat el-Shater ditangkap.
8 Juli 2013	Tentara Mesir menembaki para pendukung Mursi di depan pangkalan militer di Kairo dan menewaskan sedikitnya 50 orang.
9 Juli 2013	Mansour menunjuk ekonom Hazem el-Beblawi sebagai perdana menteri dan pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei sebagai wakil presiden. Militer mendukung keputusan ini.
26 Juli 2013	Jutaan orang membanjiri jalanan Mesir setelah panglima militer menyerukan agar dia diberi mandat untuk menghentikan setiap aksi ikhwanul Muslimin.
27 Juli 2013	Pasukan keamanan bersama kelompok pria bersenjata berbaju sipil terlibat bentrok dengan para pendukung Mursi di Kairo, sedikitnya 80 orang tewas.
7 Agustus 2013	Kantor kepresidenan Mesir menyatakan upaya diplomatik untuk mencari jalan keluar damai antara pemerintahan interim dukungan militer dengan ikhwanul Muslimn tetapi gagal.
11 Agustus 2013	Tentara Mesir mengumumkan akan mengepung dua lokasi demo besar selama 24 jam demi mencegah ada yang masuk ke sana.

12 Agustus 2013	Para pendukung Mursi mendirikan tenda-tenda perlawanan.
14 Agustus 2013	Pasukan keamanan menghancurkan tenda-tenda. Para pendukung Morsi terlibat aksi anarkis dengan polisi di Kairo dan kota-kota lain. Sedikitnya 149 orang tewas

Sumber :hminews.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB

Tabel di atas menunjukkan kronologi Mesir pada tahun 2013. Tercatat bahwa Muhammad Mursi digulingkan pada tanggal 3 Juli 2013, hal tersebut berarti bahwa Mursi memimpin Mesir selama 1 tahun lebih 2 hari. Penurunan Muhammad Mursi sama halnya dengan Husni Mubarak. Dua presiden tersebut digulingkan dari jabatannya, akibat demonstrasi massa. Mesir telah mengalami revolusi sebanyak dua kali dalam waktu dua setengah tahun.

Digulingkannya Presiden Muhammad Mursi tentu saja memiliki beberapa sebab. Berikut faktor-faktor penyebab yang dianggap sebagai pemicu pelengseran Mursi sebagai berikut :

1. Ikhwanisasi Negara

Mursi menunjuk anggota Ikhwanul Muslimin untuk menjabat di berbagai lembaga negara. Setidaknya ada 5 kader Ikhwanul Muslimin dijadikan pejabat di berbagai departemen, 8 di kantor kepresidenan, 7 jadi gubernur, 12 jadi asisten gubernur, 13 di kantor gubernur, dan 12 sebagai walikota. Hal ini ditempuh Mursi karena banyak dari pihak oposisi tidak mau bekerjasama untuk membangun pemerintahan Mesir yang lebih baik, sehingga dari orang-orang Ikhwanul Muslimin inilah yang mau menjabat dan membantu presiden Mursi menunaikan tugasnya

sebagai kepala negara. Hal ini dilakukan Mursi sebagai cara untuk menyelamatkan pemerintahannya untuk segera bergerak (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

2. Peradilan

Mursi dinilai berusaha mengontrol peradilan. Hal ini dipandang bertentangan dengan upaya Mesir untuk membangun negara demokrasi. Dia memecat jaksa Abdel Meguid Mahmoud pada November tahun lalu. Langkah Mursi itu kemudian diabaikan oleh peradilan di Mesir karena dianggap inkonstitusional. Kebijakan Mursi itu juga dinilai sebagai upaya pelemahan peradilan di Mesir (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

3. Pelengseran Orang Kuat di Militer

Mursi mengeluarkan Jenderal Muhammad Tantawi yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan semasa Husni Mubarak memimpin Mesir. Tantawi merupakan salah satu pejabat yang meminta Mubarak meninggalkan kursi presiden dalam revolusi sebelumnya. Tantawi merupakan orang kuat di tubuh militer Mesir, sehingga keputusan Mursi menimbulkan ketidakpercayaan kepadanya. Kebijakan ini diperparah dengan sikap Ikhwanul Muslimin yang dinilai terus menghina kalangan militer (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

4. Kekerasan pada Media

Pemecatan sejumlah redaktur menghantui sejumlah surat kabar negara, ditambah lagi dengan penyitaan. Kebijakan itu menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kebebasan media di Mesir di bawah kekuasaan Mursi. Lebih dari 200 wartawan dinterogasi jaksa setempat. Kantor Kepresidenan

mengajukan sekitar 100 gugatan kepada wartawan dan pimpinan media. Pemerintah juga menolak kritik dengan alasan bahwa langkah itu ditujukan pada laporan media yang dinilai menghasut dan menghina presiden (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

5. Kegagalan Ekonomi

Mursi dinilai gagal memenuhi janjinya selama kampanye presiden untuk mensejahterakan rakyat Mesir. Mursi gagal menaikkan upah dan taraf hidup rakyat. Memang Mursi baru menjabat sebagai presiden selama setahun. Waktu yang dinilai kurang untuk memulihkan perekonomian negara. Setahun Mursi memimpin setidaknya ada 558 demonstrasi, 514 aksi mogok kerja, dan 500 aksi damai sebagai protes. Sebenarnya, Mursi mencoba memperbaiki ekonomi negaranya dengan mengamandemen undang-undang pajak pada akhir November tahun lalu, namun upayanya justru menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

6. Kebijakan Luar Negeri

Kunjungan Mursi ke Teheran, Iran, dan Moskow, Rusia, menunjukkan posisinya dalam krisis Suriah. Padahal, Mursi berkuasa setelah terjadi revolusi Mesir yang mengilhami gerakan pembebasan di Suriah saat ini (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

7. Dianggap Lemah

Pemimpin di Ikhwanul Muslimin berulang kali mengumumkan keputusan dan membuat pernyataan tentang urusan negara, sehingga terlihat siapa sebenarnya yang memegang keputusan dalam pemerintahan Mursi. Publik menilai Mursi

dipandang sebagai presiden yang lemah (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

8. Deklarasi Darurat

Deklarasi darurat yang diterapkan Mursi di 3 kota yang dekat dengan Terusan Suez setelah 4 hari kerusuhan sipil dipandang tidak efektif. Kebijakan itu menyebabkan pemberlakuan jam malam selama 30 hari di kota-kota itu. Sehingga, warga menolak kebijakan ini (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

9. Pengampunan Tahanan

Keputusan Mursi mengeluarkan surat keputusan untuk mengampuni 22 tahanan ditentang. Tahanan yang diampuni itu terlibat penjualan obat terlarang dan pembunuhan (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB).

10. Tuduhan ke Oposisi

Mursi melontarkan sejumlah tuduhan ke sejumlah tokoh oposisi, seperti mantan kepala nuklir Mohammad El-Baradei, pemimpin oposisi Hamdeen Sabahi, dan Amr Moussa, serta sejumlah personel media. Mursi menuduh mereka menghasut rakyat terhadap presiden yang baru terpilih (google.com, diakses pada tanggal 4/4/2014 pukul 12.34 WIB)

C. Dampak Demokrasi Mesir

1. Penyelenggaraan Pemilu

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia (Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013: 24-26) Ciri-ciri suatu pemerintahan bersistem demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
- c. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

- d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
- e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- f. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
- g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Asas demokrasi akan melahirkan suatu ciri negara demokratis. Dua asas tersebut melahirkan beberapa ciri negara demokratis sebagai acuan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Mesir pada tahun 2012 pasca revolusi yang telah melengserkan Husni Mubarak telah mampu menjalankan sebuah pesta rakyat berupa pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa negara Mesir dapat dikatakan sebagai negara bersistem demokrasi.

Sesuai dengan Deklarasi konstitusi yang diresmikan pada bulan Maret tahun 2011, maka penerapan demokrasi di negara Mesir merujuk pada undang-undang pasal 1 yang berbunyi *The Arab Republic of Egypt is a state with a democratic system, based on citizenship, and the Egyptian people are a part of the Arab nation working toward achieving its comprehensive unity*. Pasal tersebut memberitahukan bahwa “Republik Arab Mesir adalah negara yang demokratis berdasarkan

kewarganegaraan. Orang-orang Mesir adalah bagian dari Bangsa Arab dan bekerja untuk mewujudkan kesatuan menyeluruh". Negara yang menggunakan sistem demokrasi, dalam pemilihan pemimpin suatu jabatan kenegaraan dengan menggunakan pemilu.

a. Landasan Hukum Pemilihan Presiden Mesir

Hukum Pemilihan presiden di Mesir diatur tersendiri diluar undang-undang. Hukum pemilihan presiden Mesir diatur dalam deklarasi SCAF dikeluarkan konstitusi Hukum nomor 174 Tahun 2005 tentang pemilihan presiden dan perubahannya, dan UU nomor 73 Tahun 1956 tentang praktek hak politik dan amendmennya. Perubahan terakhir dengan UU nomor 73 tahun 1956 telah disetujui oleh parlemen Mesir dan diterbitkan oleh SCAF pada tanggal 23 April 2012. UU nomor 73 1956 berisi tentang memberlakukan larangan 10 tahun pada partisipasi politik oleh setiap orang yang memegang posisi tinggi di bawah rezim Husni Mubarak. Larangan itu dikenakan pada individu yang telah memegang jabatan seperti presiden, wakil presiden, perdana menteri, kepala atau sekretaris jenderal Partai Demokratik Nasional, anggota biro kebijakan dan Komite Umum sejak tanggal 11 Februari 2001 (anonim, 2012: 1-2)

Landasan hukum pemilihan presiden, SCAF juga membuat deklarasi konstitusi yang menghasilkan Pasal 25 dan Pasal 56 tentang tanggungjawab presiden. (anonim, 2012: 1). Tanggungjawab presiden antara lain :

1. Menunjuk anggota Majelis Rakyat untuk mengisi 10 kursi disediakan untuk ditunjuk
2. Mengadakan Majelis Syura dan Dewan Rakyat.

3. Menyebarluaskan hukum atau objek untuk Majelis Syura dan Dewan Rakyat.
4. Mewakili negara tentang urusan dalam negeri dan luar negeri, menandatangani perjanjian dan kesepakatan internasional, dan dianggap sebagai bagian dari sistem hukum negara tersebut.
5. Mengangkat dan memberhentikan perdana menteri, wakil menteri dan para deputi.
6. Menunjuk dan memberhentikan perwakilan sipil, militer dan politik, sesuai dengan hukum.
7. Mengakreditasi perwakilan politik asing.
8. Membebaskan atau mengurangi hukuman sesuai keputusan.
9. Melakukan fungsi dan tanggung jawab lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Sistem Pemilu

Sistem pemilihan Presiden Mesir, dipilih melalui pemilihan umum langsung secara *voting* selama dua hari yang diselenggarakan secara serentak di negara Mesir pada 23-24 Mei. Mesir menggunakan sistem dua putaran untuk pemilihan presiden. Hal ini berarti seorang calon harus memperoleh mayoritas mutlak yaitu $50\% + 1$ dari suara sah agar dapat terpilih dalam pemilu putaran pertama, namun jika pemilihan putaran pertama, para calon presiden belum dapat memenuhi syarat yaitu $50\% + 1$, maka harus dilaksanakan pemilu presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada 16-17 Juni 2012. Putaran kedua dilakukan dengan mengambil dua kandidat dengan suara sah terbanyak dalam putaran pertama. Akhir putaran kedua, kandidat yang telah

memperoleh jumlah tertinggi suara sah, terlepas dari ambang batas apapun, akan dinyatakan menjadi presiden terpilih (anonim, 2012: 2)

Pemilu presiden Mesir pada tahun 2012, terselenggara di seluruh pelosok Mesir, seperti saat penyelenggaraan pemilu parlemen. Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 50.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Mesir. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disesuaikan dengan pemilu Parlemen. Sehingga Daftar Pemilih tetap (DPT) dan Tempat pemungutan Suara (TPS) dinyatakan samadalam penyelenggaraannya, yaitu pemilu parlemen dan pemilu presiden. Pemungutan suara dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah Mesir. Pemilih dialokasikan ke TPS terdekat dengan alamat yang tercantum pada kartu tanda penduduk Mesir. Kertas suara yang tersedia sebanyak 1.000 kertas suara di setiap TPS (anonim, 2012: 2)

Daftar pemilih disusun atas dasar informasi *database* kartu identitas nasional. Data informasi dari semua warga negara Mesir yang memiliki KTP, yang berumur diatas 18 tahun berhak untuk memilih. Database KTP Nasional ditransfer ke *database* daftar pemilih tetap. Daftar pemilih yang pada akhirnya akan didistribusikan ke setiap TPS (anonim, 2012: 7)

Hak untuk memilih dijelaskan menurut Pasal 1, 2 dan 3 UU 73 Tahun 1956 tentang Praktek Hak Politik, semua warga Mesir yang berusia lebih dari 18 tahun, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, parlemen dan lokal. Pasal ini juga menetapkan bahwa pejabat dan anggota angkatan bersenjata, serta perwira dan personil polisi, tidak berhak untuk memilih sepanjang mereka masih menjabat di posisi tersebut (anonim, 2012: 3). Selain para anggota bersenjata, pewira,

dan personil polisi, penduduk Mesir yang tidak dapat menggunakan hak politiknya adalah

1. Warga Mesir yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, kecuali warga Mesir yang kemudian terbukti tidak bersalah.
2. Para tahanan.
3. Orang-orang Mesir dengan penyakit mental.
4. Warga negara yang telah menyatakan berpindah kewarganegaraan tidak memenuhi syarat untuk memilih dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal keberpindahan kewarganegaraan tersebut.

a. Syarat Calon Presiden Mesir

Menurut Pasal 1 UU 174 tahun 2005 tentang Pemilu Presiden, untuk memenuhi syarat sebagai calon presiden, seseorang harus berkebangsaan Mesir dan lahir dari orang tua yang keduanya memiliki kewarganegaraan Mesir. Selain itu, baik calon maupun orang tuanya berkebangsaan selain Mesir atau menikah dengan non-Mesir, maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden Mesir. Syarat lainnya, yaitu Kandidat calon presiden harus berusia minimal 40 tahun (anonim, 2012: 3). Pasal 2 UU 174 tahun 2005 menyatakan bahwa calon memiliki dua pilihan untuk mengajukan nominasi mereka:

1. Calon secara resmi didukung oleh setidaknya 30 anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Syura
2. Kandidat harus mengamankan dukungan tidak kurang dari 30.000 pemilih dan minimal 15 provinsi dengan tidak kurang dari 1.000 pendukung di setiap provinsi.

commit to user

3. Partai-partai politik yang anggotanya diperoleh setidaknya satu kursi di tahun 2011-2012 pada pemilihan parlemen, baik di Majelis Rakyat atau Dewan Syura, sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 2 UU 174 tahun 2005 dapat mengajukan salah satu anggotanya untuk pencalonan.

b. Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu bertanggungjawab untuk mengelola pemilihan presiden adalah *Supreme Presidential Elections Commission* (SPEC). Saat ini, sistem manajemen pemilu di Mesir didasarkan pada pembentukan badan khusus, masing-masing dengan mandat dan tanggungjawab untuk mengelola pemilihan tertentu atau proses referendum sementara. Masing-masing lembaga ini dibubarkan pada saat selesainya proses pemilihan selesainya mandat untuk mengawasi. Pemilihan parlemen baru-baru ini diberikan oleh Komisi Pemilihan Tinggi Kehakiman yang bernama *High Judiciary Elections Commission* (HJEC) yang memiliki komposisi yang berbeda dan mandat dari SPEC (anonim, 2012: 3)

Deklarasi Konstitusi dan Hukum 174 Tahun 2005 tentang Pemilihan Presiden mandat komisi yudisial, menyatakan bahwa Komisi Agung Pemilihan Presiden (SPEC), sebagai satu-satunya badan yang bertanggungjawab untuk mengawasi pemilihan presiden. Tugas SPEC mencakup periode mulai dari pengumuman pembukaan periode nominasi kandidat untuk pengumuman hasil akhir dalam pemilihan presiden. SPEC ini terdiri dari lima komisaris dan dipimpin oleh presiden Mahkamah Konstitusi Agung. Anggota lainnya termasuk kepala pengadilan Kairo, deputi tinggi Kantor Presiden Mahkamah Konstitusi Agung, para deputi tinggi

Kantor Ketua Pengadilan Kasasi dan deputi paling tinggi kantor Presiden Dewan Negara (anonim, 2012:4). Hak dan tanggungjawab SPEC sebagai berikut :

1. Membuat prosedur proses nominasi calon, menetapkan dan mengumumkan nominasi calon presiden serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Menerima dan memeriksa berkas dari calon presiden dan memverifikasi para calon presiden yang memenuhi syarat.
3. Menyusun, mengumpulkan dan mengumumkan daftar calon presiden.
4. Menentukan tanggal awal dan akhir untuk kampanye pemilihan presiden.
5. Memastikan semua tertib terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu, termasuk akses yang sama dengan semua kandidat dalam penggunaan media milik negara, dan menyelesaikan setiap pelanggaran.
6. Mengawasi polling dan proses penghitungan suara.
7. Menentukan segala aspek baik SPEC ditingkat provinsi dan daerah
8. Dalam waktu tiga hari setelah menerima konsolidasi hasil pemilu dari Komite Pemilihan Umum, menetapkan dan mengumumkan hasil akhir presiden terpilih.
9. Menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan akhir pada setiap keluhan yang timbul selama proses pemilihan presiden. Berbeda dengan keputusan pengadilan (HJEC), keputusan SPEC pada proses pemilu membawa kekuatan hukum dan dianggap final. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat dibatalkan atau bandingoleh badan lain.
10. Menentukan semua hal yang berkaitan dengan yurisdiksi SPEC dan setiap potensi konflik yurisdiksi. *commit to user*

Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas semua dukungan Administrasi, operasional dan Logistik yang diperlukan untuk alat proses Pemilu, misalnya, pengadaanpenanganansurat suara, kotak Suara, tinta permanen dll. Kementrian Dalam Negeri bertugas untuk mengawasi semua aturan keamananuntukalat prosespemilihan. Lembaga Peradilanmemegang sejumlahperan dan tanggung jawabselama prosespemilihan presiden. SemuaTPSyangdipimpin olehanggotaperadilan. Hakimjuga terdiri darikepaladananggota KomitePemilihan Umumdi tingkat provinsi. Hakimini mengawasiTPSdan tabulasi hasil. **Kampanye pemilu untuk pemilihan presiden diatur oleh UU 174 Tahun 2005 tentang Pemilihan Presiden (anonim, 2012: 6) Pasal 21menetapkan** bahwacalon:

1. Dilarang mengekspos fakta-fakta tentang kehidupan pribadi dari kandidat lainnya
2. Harus melindungi persatuan nasional dan menjauhkan diri dari menggunakan slogan-slogan religius
3. Dilarang menggunakan atau mengancam untuk menggunakan, segala bentuk kekerasan
4. Dilarang menawarkan hadiah, donasi, bantuan dalam bentuk tunai atau barang atau keuntungan lainnya atau menjanjikan untuk menawarkan pada rakyat, baik langsung atau tidak langsung
5. Dilarang menggunakan fasilitas milik negara, sektor publik atau bangunan milik negara, fasilitas dan sarana transportasi untuk tujuan kampanye pemilu.

6. Dilarang menggunakan fasilitas milik negara, tempat ibadah, sekolah, universitas dan lembaga pendidikan publik atau swasta lainnya untuk keperluan kampanye pemilu

c. Calon Presiden Mesir

Awalnya 23 calon resmi terdaftar untuk ikut pemilihan. Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) bertugas untuk menyeleksi daftar bakal calon presiden yang memenuhi persyaratan hukum dan memenuhi syarat sebagai calon presiden. Pada tanggal 14 April 2012, Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) mengumumkan diskualifikasi sepuluh kandidat: Omar Suleiman, Khairat El-Shater, Hazem Salah Abu Ismail, Ayman Nour, Ahmad Awad Al-Saidi, Mortada Mansour, Ibrahim El-Gharib, Mamdouh Qutb, Houssam Khayrat dan Ashraf Barouma. Alasan diskualifikasi tidak diumumkan, namun calon yang terkena diskualifikasi diberi waktu 48 jam untuk mengajukan banding atas keputusan SPEC (anonim, 2012: 6).

Omar Suleiman dan Khairat El-Shater mengajukan banding, namun ditolak oleh pihak SPEC. Merujuk pada deklarasi SCAF bahwa orang-orang yang telah menjadi pejabat di pemerintahan Husni Mubarak, maka dilarang untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Keputusan SCAF mengeliminasi dua calon, yaitu Omar Suleiman dan Ahmad Shafik. Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) menerima kasasi yang diajukan oleh Ahmad Shafik atas keputusan sebelumnya untuk meloloskan dirinya dari pencalonan Presiden. Oleh karena itu, total 13 kandidat diloloskan SPEC sebagai calon presiden Mesir. Hasil verifikasi calon presiden Mesir, telah diputuskan 13 calon terdaftar yaitu Ahmad Shafik, Abdul Moneim Aboul Fotouh, Khalid Ali, Mohammad Salim Al-Awa, Hisham Bastawisy, Abu Al-Izz Al-

Hariri, Amr Moussa, Hamdeen Sabahi, Muhammad Mursi, Muhammad Fawzi Issa, Abdallah al-Ashal, Mahmud Hussam, Husam Khayrallah (anonim, 2012: 1-2)

Putaran pertama pemilu presiden Mesir di ikuti oleh 13 kandidat, namun diputaran kedua hanya Ahmad Shafik dan Muhammad Mursi yang mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama. Ahmad Shafiq dan Muhammad Mursi memiliki catatan perjalanan yang sama-sama menarik sehingga mampu mengumpulkan suara terbanyak diantara kandidat yang lain.

Latar belakang Ahmad Shafik adalah perdana Menteri terakhir yang ditunjuk oleh Husni Mubarak setelah awal 2011 revolusi di bulan Januari. Ahmad Shafik mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret 2011, jabatan tersebut hanya tiga minggu. Pencalonannya menimbulkan kemarahan dari kalangan yang menganggapnya sebagai pendukung Mubarak. Shafik pada mulanya dilarang ikut mencalonkan diri namun diaktifkan kembali setelah mengajukan banding. Shafik menekankan ia selalu mengutarakan penentangan di dalam rezim Mubarak (anonim, 2012: 34)

Muhammad Mursi adalah ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin setelah revolusi Mesir pada tahun 2011. Muhamad Mursi adalah seorang Anggota Parlemen 2000-2005. Mursi menerima *Bachelor* dan gelar Master teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1975 dan 1978. Muhammad Mursi merupakan lulusan dari *University of Southern California* bidang teknik pada tahun 1982. Muhamad Mursi adalah Asisten Profesor di *California State University, Northridge* 1982-1985. Tahun 1985 ia kembali ke Mesir untuk mengajar di Universitas Zagazig. (M. Agastya ABM, 2013: 62).

c. Calon Presiden Mesir

Awalnya 23 calon resmi terdaftar untuk ikut pemilihan. Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) bertugas untuk menyeleksi daftar bakal calon presiden yang memenuhi persyaratan hukum dan memenuhi syarat sebagai calon presiden. Pada tanggal 14 April 2012, Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) mengumumkan diskualifikasi sepuluh kandidat: Omar Suleiman, Khairat El-Shater, Hazem Salah Abu Ismail, Ayman Nour, Ahmad Awad Al-Saidi, Mortada Mansour, Ibrahim El-Gharib, Mamdouh Qutb, Houssam Khayrat dan Ashraf Barouma. Alasan diskualifikasi tidak diumumkan, namun calon yang terkena diskualifikasi diberi waktu 48 jam untuk mengajukan banding atas keputusan SPEC (anonim, 2012: 6).

Omar Suleiman dan Khairat El-Shater mengajukan banding, namun ditolak oleh pihak SPEC. Merujuk pada deklarasi SCAF bahwa orang-orang yang telah menjadi pejabat di pemerintahan Husni Mubarak, maka dilarang untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Keputusan SCAF mengeliminasi dua calon, yaitu Omar Suleiman dan Ahmad Shafik. Komisi Pemilihan Presiden Tertinggi (SPEC) menerima kasasi yang diajukan oleh Ahmad Shafik atas keputusan sebelumnya untuk meloloskan dirinya dari pencalonan Presiden. Oleh karena itu, total 13 kandidat diloloskan SPEC sebagai calon presiden Mesir. Hasil verifikasi calon presiden Mesir, telah diputuskan 13 calon terdaftar yaitu Ahmad Shafik, Abdul Moneim Aboul Fotouh, Khalid Ali, Mohammad Salim Al-Awa, Hisham Bastawisy, Abu Al-Izz Al-Hariri, Amr Moussa, Hamdeen Sabahi, Muhammad Mursi, Muhammad Fawzi Issa, Abdallah al-Ashal, Mahmud Hussam, Husam Khayrallah (anonim, 2012: 1-2)

Putaran pertama pemilu presiden Mesir di ikuti oleh 13 kandidat, namun diputaran kedua hanya Ahmad Shafik dan Muhammad Mursi yang mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama. Ahmad Shafiq dan Muhammad Mursi memiliki catatan perjalanan yang sama-sama menarik sehingga mampu mengumulkan suara terbanyak diantara kandidiat yang lain.

Latar belakang Ahmad Shafik adalah perdana Menteri terakhir yang ditunjuk oleh Husni Mubarak setelah awal 2011 revolusi di bulan Januari. Ahmad Shafik mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret 2011, jabatan tersebut hanya tiga minggu. Pencalonannya menimbulkan kemarahan dari kalangan yang menganggapnya sebagai pendukung Mubarak. Shafik pada mulanya dilarang ikut mencalonkan diri namun diaktifkan kembali setelah mengajukan banding. Shafik menekankan ia selalu mengutarakan penentangan di dalam rezim Mubarak (anonim, 2012: 34)

Muhammad Mursi adalah ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin setelah revolusi Mesir pada tahun 2011. Muhamad Mursi adalah seorang Anggota Parlemen 2000-2005. Mursi menerima *Bachelor* dan gelar Master teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1975 dan 1978. Muhammad Mursi merupakan lulusan dari *University of Southern California* bidang teknik pada tahun 1982. Muhamad Mursi adalah Asisten Profesor di *California State University*, Northridge 1982-1985. Tahun 1985 ia kembali ke Mesir untuk mengajar di Universitas Zagazig .(M. Agastya ABM, 2013: 62).

d. Pemilu presiden Mesir Putaran pertama dan kedua tahun 2012

Pemilihan presiden Mesir tahun 2012, diikuti oleh 13 calon presiden yang sudah dinyatakan lolos. Berikut perolehan suara pemilu presiden Mesir:

Tabel 5

Perolehan suara pemilu presiden putaran pertama dan kedua

Calon	Pihak	Babak 1		Babak 2	
		Suara	%	Suara	%
Muhammad Morsi	Kebebasan dan Keadilan	5.764.952	24,78%	13230131	51,73%
Ahmad Shafik	Independen	5.505.327	23,66 %	12347380	48,27%
Hamdeen Sabahi	Partai Dignity	4.820.273	20,72%		
Abdul Moneim Aboul Fotouh	Independen	4.065.239	17,47%		
Ammir Mussa	Independen	2.588.850	11,13%		
Mohammad Salim Al-Awa	Independen	235.374	1,01 %		
Khalid Ali	Independen	134.056	0,58%		
Abu Al-Izz Al-Hariri	Sosialis Populer Aliansi Partai	40090	0,17%		
Hisham Bastawisy	Nasional Progresif Partai Unionis	29189	0,13%		
Mahmud Hussam	Independen	23992	0,10%		
Mohammad Fawzi Issa	Partai Demokrat Generation	23889	0,10%		
Houssam Khairallah	Partai Damai Demokrat	22036	0,09%		
Abdulla Alashaal	Keaslian Party	12249	0,05%		
Jumlah suara sah		23265516	98,28%	25577511	96,81%
suara tidak sah		406.720	1,72%	843.252	3,19%
Pemilih		23672236	46,42%	26420763	51,85%
Abstain		27324510	53,58%	24538031	48,15%
Pemilih yang terdaftar		50996746		50958794	

Sumber:(anonim, 2012: 63)

Pemilihan presiden diadakan di Mesir dalam dua putaran, pertama pada tanggal 23 dan 24 Mei 2012. Putaran kedua tanggal 16 dan 17 Juni 2012. Pemilu presiden Mesir tahun 2012 adalah pemilihan presiden kedua di Mesir dengan lebih

dari satu kandidat, setelah pemilu 2005. Pemilu presiden Mesir 2012 pertama setelah revolusi Mesir 2011. Menggulingkan Presiden Husni Mubarak , selama musim semi Arabatau yang lebih dikenal dengan *Arab Spring*.

Babak pertama, dengan tingkat partisipasi pemilih 46%, hasilnya dibagi antara lima kandidat utama: Mohamad Morsi (25%), Ahmed Shafik (24%), Hamdeen Sabahi (21%), Abdul Moneim Aboul Fotouh (18%), dan Amr Moussa (11%), sedangkan 2% sisanya dibagi antara beberapa kandidat yang lebih kecil. Babak kedua, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 52%, Muhammad Mursi mendapatkan perolehan suara sebanyak 51,7 %, sedangkan Ahmad Shafik mendaptkan suara 48,3%. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa Mursi adalah presiden pilihan rakyat, maka pada tanggal 24 Juni 2012, Komisi pemilihan umum presiden Mesir (SPEC) menyatakan bahwa Muhammad Mursi sebagai presiden terpilih yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin. Pelantikan Muhammad Mursi dilaksanakan pada 30 Juni 2012 (anonim, 2012: 63)

Pemilu Mesir sudah melalui proses menuju negara demokrasi sesuai Undang-undang konstitusi yang telah ditetapkan oleh negara Mesir, namun yang paling disayangkan adalah ketika pemerintahan Mesir sudah membuka kebebasan rakyat mesir untuk menggunakan hak politiknya, banyak rakyat Mesir yang tidak menggunakan hak politk tersebut. Tercatat pada pemilu presiden putaran pertama, sebanyak 46,42 % yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 53,58% tidak menggunakan hak pilihnya. Putaran kedua, 51,85% menggunakan hak pilihnya, 48,15% tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasif rakyat Mesir dalam pemilu presiden tahun 2012 masih rendah.

2. Pengakuan hakikat dan Martabat Manusia

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia berdasarkan martabatnya. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh suatu negara. Negara boleh saja tidak mengakuinya, namun pengingkaran suatu negara tidak akan menghilangkan hak asasi manusia itu sendiri (Margis Suseno 1987 :112). Hak asasi yang dimiliki oleh manusia dan harus dijunjung tinggi yaitu (1) Hak asasi pribadi / *personal Right* (2) Hak asasi politik / *Political Right* (3) Hak asasi hukum dan peradilan / *Legal Equality Right and procedural right* (4) Hak asasi Ekonomi / *Property Rights*. Realita pada tahun 2011 hingga 2013, Mesir tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam masalah hak Asasi Manusia. Berikut akan dipaparkan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Mesir.

Sebenarnya pada tahun 2011 hingga 2013, Mesir tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam masalah hak Asasi Manusia. Berikut akan dipaparkan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Mesir.

a. Hak pribadi

Hak pribadi rakyat Mesir tentang hak untuk mendapatkan rumah dan hak bebas berpergian sudah terealisasi dengan baik. Sebelum revolusi tahun 2011, kebebasan untuk memiliki tempat tinggal tidak menjadi problematika di negara piramida ini. Kebebasan berpendapat pada tahun 2011 sampai tahun 2013 sudah jauh lebih terbuka dibandingkan saat rezim Husni Mubarak. Sosial Media seperti *twitter*, *facebook* dan blog sudah banyak rakyat Mesir yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengemukakan pendapat. Terbukti pada saat revolusi Mesir tahun 2011, seorang yang bernama Wael Ali dan Azma Mahfuz menjadi tokoh penggerak

Revolusi tahun 2011 melalui sosial Media. Wael Ali dan Azma Mahfuz menceritakan dan mengunggah video lewat *youtube*. Kebebasan berpendapat yang menyangkut pemerintahan dan militer masih dibatasi. Laporan *Human Right Report in Egypt 2013* menyatakan sebagai berikut :

“...Following President Morsy’s election, the authorities ordered the closure of one TV station and censored at least three editions of newspapers. The public prosecutor filed criminal defamation charges against at least nine journalists in connection with their writing or broadcasting. In November, the minister of justice appointed an investigative judge to interrogate a number of journalists and activists on charges of “insulting the judiciary.” In 2012, prosecutors interrogated or indicted at least 15 individuals on criminal charges of “insulting religion.” In September, a court in Assiout sentenced Bishoy Kamel to six years’ imprisonment for “insulting Islam.” In the same month, the blasphemy trial opened of Alber Saber, whose atheist beliefs led to his indictment on charges of insulting Islam and Christianity. Media freedom activists criticized the upper house of parliament, the Shura Council, for failing to include independent journalists in their appointments of the new editors of state newspapers. In August, President Morsy amended the press law to cancel pretrial detention for journalists after a judge ordered the detention of Islam Afifi, editor of *Dustoor* newspaper, after he was charged with defamation..”(<http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/egypt>, diakses pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 12.41 WIB)

Permasalahan kebebasan berpendapat di Mesir juga berkaitan dengan kebebasan beragama. Persaingan antar agama dan kurangnya toleransi umat beragama membuat rakyat Mesir mudah melakukan sikap diluar batas. Hal tersebut terjadi seperti yang dilaporkan *Human Right Watch World Report in Egypt in 2013* sebagai berikut :

Incidents of sectarian violence between Copts and Muslims continued throughout 2012 with no new prosecutions or serious investigations, with the exception of the investigation into sectarian violence in Dahshour, Giza, where prosecutors ordered the detention of nine suspects. On February 1, police and local religious and political leaders ordered the eviction of eight Christian families after Muslim residents sacked homes and shops of Christian residents in the village of Sharbat, near Alexandria. The eviction was overturned two weeks later after parliamentarians visited the area, but by the end of the year, police had still failed to prosecute anyone for the violence despite a police report identifying suspects. On May 21, 2012, in the southern city of Minya an Emergency State Security court, which does not meet fair

trial standards, sentenced 12 Christians to life in prison and acquitted 8 Muslim defendants who had been charged in connection with clashes between Muslims and Christians in April 2011. The clashes had left two Muslims dead, several wounded from both sides, and scores of Christian shops and homes torched. (<http://www.hrw.org/world-report/2013country-chapters/egypt/egypt?page=2> diakses pada tanggal 2 Juli 2014 pukul 9.45 WIB)

Kebebasan berserikat juga termasuk hak asasi pribadi setiap Manusia. Mesir memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) non pemerintah, sehingga pendirian dan hak milik LSM tersebut bersifat swasta. Pendirian LSM haruslah memiliki izin dari pemerintah. Tahun 2011 kebebasan berserikat sebenarnya sudah mulai terbuka, hanya saja pengurusan izin dari pemerintah yang masih sulit. *Human Right Watch World Report in Egypt 2013* melaporkan bahwa

“...Parliamentarians have been drafting a new law on associations which was nearing completion when a court dissolved parliament. Meanwhile, Egypt continues to apply the repressive Mubarak-era law 84 on associations. In 2011, the government launched investigations into scores of unregistered nongovernmental organizations), in many cases human rights organizations whose registration had been blocked by the security agencies. As a result, 43 NGO workers, 16 Egyptians and 27 foreign nationals, were charged with operating “unlicensed” groups under the existing law on associations. The trial started in March. Security agencies also blocked funding for human rights projects at registered NGOs, leading to a freeze on activities and a loss of staff. The New Women Foundation, a local women’s rights group, sued the government after being unable to obtain approval for incoming foreign funds for ongoing projects. (anonim, 2013 :508)

Kejadian di tahun tersebut juga dialami beberapa LSM pada tahun 2012 ketika Muhammad Mursi menjadi presiden. Realita yang terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012 kebebasan untuk berserikat masih sama dan belum ada perkembangan (anonim, 2013 :508)

Mesir pasca revolusi memang sulit untuk mengubah suatu tatanan masyarakat dari sistem diktator monarki menuju sistem demokrasi. Perjalanan menuju kestabilan sistem demokrasi sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, karena

dalam upaya merekonstruksi suatu pemerintahan dibutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat Mesir.

b. Hak Asasi Politik

Tahun 2011 sampai 2012, Mesir telah melaksanakan pemilu perlemen dan pemilu Presiden. Masyarakat Mesir yang memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam konstitusi pemilihan Umum, berhak menggunakan hak politiknya. Laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat, pada hakikatnya wajib menggunakan hak pilihnya. Pembentukan partai pada tahun 2011 sudah mulai bebas dan berhak mengikuti persaingan dalam merebutkan suatu jabatan.

“...According to the 2012 constitution and the July 8 Constitutional Declaration, citizens were free to form, legally register, and operate political parties, although the 2012 constitution prohibited forming any party “that discriminates on the basis of gender, origin, or religion.” The law requires new parties to have a minimum of 5,000 members from at least 10 provinces. After July 3, authorities arrested thousands of members and many leaders of Islamist parties, such as the MB’s Freedom and Justice Party and the Al Wasat Party...” (<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220350.htm> diakses pada tanggal 3 Juli 2014 pukul 12.13 WIB)

Pernyataan di atas telah menunjukkan bahwa dalam konstitusi tentang pembentukan partai politik tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap gender, agama, dan ras. Peran perempuan dalam ranah politik masih tergolong terbatas, sebab peluang perempuan berpolitik hanya berhak untuk memilih, sedangkan hak untuk dipilih masih terbatas. Faktor agama juga menjadi penyebab minimnya perempuan yang mengikuti panggung politik. Beberapa ulama Islam melarang perempuan untuk berpolitik, sedangkan perempuan yang beragama Kristen menjadi golongan minoritas, karena Mesir mayoritas beragama Islam

Hak asasi politik yang masih rendah terjadi di negara Mesir pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Banyaknya pro kontra terkait kancah perempuan dipangung politik. Kaum laki-laki dari golongan masyarakat sipil sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam panggung politik, hal ini terbukti dari pemilu presiden tahun 2012 bahwa diantara 13 kandidat, 6 kandidat berasal dari independen. Runtuhnya rezim monarki dan diktaktor, sangat membuka peluang rakyat Mesir untuk menggunakan hak politiknya, sedangkan kaum perempuan sebenarnya dibebaskan memilih untuk terlibat langsung menjadi calon petinggi negara ataupun partisipan aktif. Indikator hak asasi politik di negara Mesir lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Hak azasi hukum / *Legal Equality Right*

Perlindungan hukum adalah salah satu hak asasi yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Hukum merupakan elemen terpenting dalam mengatur tatanan masyarakat. Banyaknya kasus di Mesir seperti kekerasan, pemerkosaan, diskriminasi perlu diatur dalam sebuah konstitusi. Belum ada proses keadilan transisi di Mesir dalam aksi kejahatan dari era Mubarak, serta belum adanya akuntabilitas nyata bagi kekerasan selama Januari 2011 dalam pemberontakan, yang menewaskan 846 orang meninggal. Aksi demonstrasi tahun 2011 banyak pemuda yang ditangkap dan disiksa dalam tahanan. Demonstrasi Mesir tahun 2013 menjadi salah satu titik fokus dalam banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Peristiwa tanggal 26 November menjadi aksi pelanggaran HAM yang cukup parah. Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan aksi kekerasan fisik. Militer tidak memberikan perlindungan, justru memberikan aksi kekerasan terhadap demonstran

yang mendukung Mursi. Aksi tersebut juga diikuti oleh perempuan –perempuan pendukung Mursi, namun mereka juga mengalami aksi kekerasan serupa. Akibat aksi tersebut, pemerkosaan tidak terhindarkan. Perempuan-perempuan diperkosa, hal ini merupakan pelanggaran besar. Hukuman yang diberikan kepada tersangka tidak berpihak pada keadilan. <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013/nea/220350.htm> diakses pada tanggal 4 Juli 2014 pukul 13.15 WIB)

Kurangnya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan menjadi catatan tersendiri terkait hak asasi manusia. Hukum yang mengatur perempuan dan anak-anak di negara Mesir masih sangat minim. Apalagi untuk anak di bawah umur 18 tahun. Perlindungan dan keterbukaan hukum untuk perempuan dan anak harus dibentuk dan ditegaskan, agar tercipta keadilan di sebuah negara. Peristiwa tahun 2011-2013 dalam hal perlindungan hukum masih sangat kurang. Hukum adalah sesuatu yang paling penting dalam penegakkan keadilan.

Konflik yang terjadi pada tahun 2013, ketika Muhammad Mursi digulingkan, banyak terjadi pelanggaran HAM. Kubu pro Mursi ditahan oleh militer dengan aksi kekerasan. Pendukung Mursi merupakan pendukung yang tidak rela jika Muhammad Mursi diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Kubu anti Mursi meminta agar Mursi segera turun dari jabatan. Militer merupakan kubu yang anti dengan Mursi, sehingga militer ikut berperan aktif dalam pengkudetaan Muhammad Mursi (Agastya ABM : 2013: 62)

Ratusan korban yang meninggal saat demonstrasi Mesir merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kebebasan untuk berserikat dan berpartai

politik mulai dibatasi kembali, salah satu bukti adalah Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Masalah hak asasi manusia yang paling signifikan adalah penghapusan sebuah terpilih pemerintahan sipil, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan. Aksi kekerasan militer termasuk melanggar hukum. Aksi tersebut berupa pembunuhan dan penyiksaan dan penindasan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Mesir seperti, pembatasan kebebasan sipil, pembatasan kebebasan berekspresi dan pers, pembatasan kebebasan berserikat, serta kekerasan yang dilakukan militer kepada rakyat sipil.

d. Hak Asasi Ekonomi

Masalah perekonomian, pengangguran dan rendahnya upah masyarakat Mesir memicu terjadi demonstrasi tahun 2011. Kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan masih terbatas oleh persoalan gender. Perempuan berpendidikan lebih banyak beresiko menjadi pengangguran daripada laki-laki. Perekonomian yang dikuasai oleh militer membuat perempuan semakin kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih dalam sektor-sektor penting. Hal ini merupakan ketidakadilan terhadap perempuan-perempuan Mesir. *Human Right Watch World Report in Egypt 2013* melaporkan bahwa

Women were excluded from high-level positions in large sectors of the economy controlled by the military, since women did not serve in the military and thus were not given access to these jobs. In 2011 the government reported women were five times more likely to be unemployed than men. More than half of female university graduates were unemployed (anonim, 2011:28)

Pemuda yang berusia produktif lulusan universitas tidak mendapatkan pekerjaan. Diskriminasi dan eksploitasi anak juga menjadi problematika tersendiri

terkait dengan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Tahun 2012 saat pemerintahan Muhammad Mursi, masalah perekonomian tersebut juga belum menemukan titik terang. Singkatnya masa jabatan Muhammad Mursi menjadi penghalang tersendiri, sebab saat Mursi menjabat sebagai presiden langkah yang baru dikerjakan Mursi masih dalam tahapan kontrak industri dan belum sempat meresmikan industri baru (Agastya ABM : 2013 :72)

3. Demokrasi Mesir dan Demokrasi di Indonesia

Terpilihnya presiden Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir pertama melalui jalur demokratis merupakan bukti kemajuan Mesir dalam proses demokrasi. Kendati demikian, ketidakpastian masih tetap membayangi Revolusi di Mesir. Hal ini dikarenakan Militer yang telah berkuasa selama pemerintahan husni Mubarak dan menjadi penyelenggaraan pemerintahan transisi tak sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih. Muhammad Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang saat itu menjadi pengawal pergerakan rakyat, saat ini benar-benar dilucuti dengan adanya revolusi.

Revolusi Mesir yang berhasil menggulingkan Husni Mubarak memiliki kesamaan dengan reformasi Indonesia 1998 yang menjatuhkan presiden Soeharto. Revolusi Mesir dan reformasi Indonesia sama-sama tidak memiliki tokoh sentral gerakan. Mesir dan Indonesia sama-sama tidak mempunyai ideologi dan sistem yang ditawarkan setelah rezim tumbang. Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menjalankan proses demokrasi dan menyelesaikan konflik dalam negeri. Proses demokrasi merupakan masa yang paling rentan dalam pembangunan demokrasi di

suatu negara. Hal ini dikarenakan proses transisi dari rezim lama ke rezim baru belum memiliki sistem suatu negara.

Pemerintahan Mesir seharusnya belajar dari pemerintahan Indonesia pada tahun 1998. Meskipun terdapat perang ideologi, namun dapat terselesaikan dengan adanya dialog. Pemerintahan Mesir seharusnya mampu mengupayakan adanya visi yang sama yakni membangun pemerintahan sipil yang demokratis meskipun terdapat pandangan yang tajam antara kelompok liberal, sosialis, dan islamis. Hubungan kesejarahan yang cukup erat antara Indonesia dan Mesir, maka DPR- RI perlu mendorong pemerintah agar meningkatkan diplomasi untuk membantu proses demokrasi di Mesir. Indonesia diharapkan mampu mengajak semua pihak untuk bernegosiasi politik demi terciptanya demokrasi di Mesir.

Mesir dan Indonesia memiliki kedekatan kesejarahan yang sangat erat. Pasca reformasi 1998 mengangkat BJ. Habibie menjadi presiden yang baru. Menyadari tentang itu, Indonesia mengirim BJ. Habibie untuk melakukan dialog kebangsaan dengan pemerintah Mesir.